



PrADa

Profil dan Analisis Daerah

**Provinsi:
MALUKU, 2017**

Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional

Tim Penyusun



Penanggung Jawab:
Ir. Rudy S. Prawiradinata, MCRP, Ph.D
Deputi Bidang Pengembangan Regional



Ketua Tim Pelaksana:
Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D
Direktur Pengembangan Wilayah
dan Kawasan



Anggota Tim Pelaksana:
Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM
Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Permukiman



Anggota Tim Pelaksana:
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi
dan Perdesaan



Anggota Tim Pelaksana:
Ir. Aryawan Soetiarso Poetro, MSI
Direktur Otonomi Daerah



Anggota Tim Pelaksana:
Uke Muhammad Hussein, SSI, MPP
Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**



Kata Pengantar



Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antardaerah atau ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Selanjutnya dalam perspektif pembangunan wilayah, upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak dapat dilakukan hanya dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi lebih jauh dari pada itu yakni pentingnya untuk memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta ketersediaan infrastruktur pendukung wilayah lainnya. Faktor-faktor tersebut, merupakan kunci utama bagi daerah dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya, terlepas dari adanya perbedaan *resources* yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) yang disusun ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kepentingan pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah, melalui program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah dengan fokus utama pada aspek pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Jakarta, Desember 2017
Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Rudy S. Prawiradinata

**Kedeputan Bidang
Pengembangan Regional**

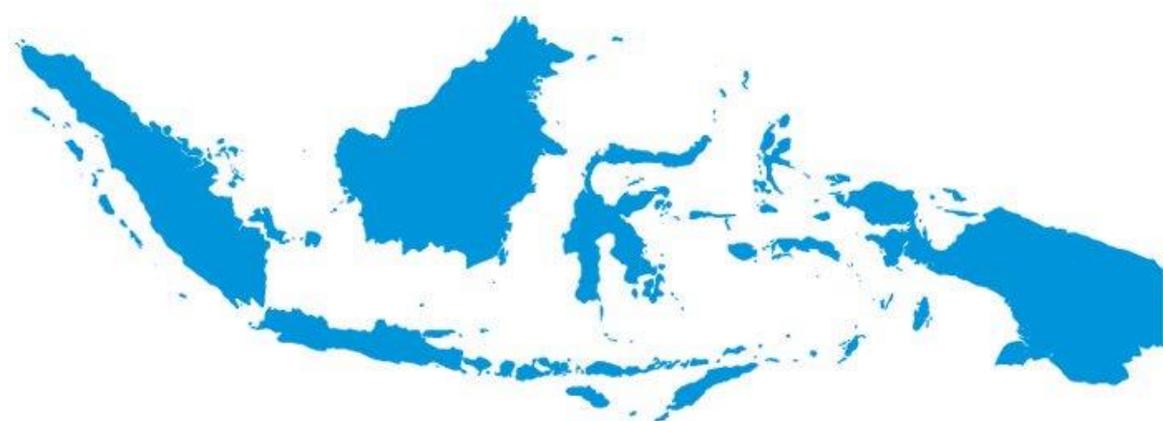


DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI**

Bab-1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Manfaat	5
Bab-2 METODOLOGI	6
2.1. Lingkup Kegiatan	7
2.2. Metode Analisis	7
Bab-3 PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL PROVINSI MALUKU	11
3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Maluku	12
3.2. Tingkat Kemiskinan	14
3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	15
3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	16
Bab-4 PrADa PROVINSI MALUKU	17
4.1. Tematik Pendidikan	20
4.2. Tematik Kesehatan	28
4.3. Tematik Penanggulangan Kemiskinan	36
4.4. Tematik Perumahan dan Permukiman	43
4.5. Tematik Ketahanan Pangan	53
4.6. Tematik Ketahanan Energi	62
4.7. Tematik Infrastruktur	70
4.8. Tematik Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan	77
Bab-5 PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Rekomendasi	85

Bab-1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar-daerah atau ketimpangan wilayah. Berkaitan dengan itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo, dua dari tiga masalah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah bersangkutan dengan masalah ketimpangan atau kesenjangan, yaitu ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat dan ketidakseimbangan ekonomi antar-daerah. Satu masalah lainnya adalah persoalan lapangan kerja produktif dan pengangguran (Djojohadikusumo, 1994:191). Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar-daerah selalu menjadi salah satu isu utama pembangunan daerah di Indonesia.

Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi adalah merupakan suatu keniscayaan, baik dalam tataran antar-negara maupun antar-daerah di suatu negara. Fenomena kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan dalam alokasi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi. Hirschman melihat bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi dalam perkembangan ekonomi antar-negara, tetapi terjadi juga kesenjangan dalam perkembangan wilayah. Jika di dunia ini terdapat negara-negara maju dan negara-negara terbelakang, maka dalam suatu negara pun terdapat wilayah-wilayah yang maju dan wilayah-wilayah yang terbelakang (Nurzaman, 2002:91).

Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam kerangka yang lebih luas, kesenjangan yang terjadi di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih dilatarbelakangi oleh hampir seluruh perbedaan tersebut, yaitu aktivitas ekonomi, kondisi alam dan juga administratif.

Asal dari kesenjangan antar-daerah atau kesenjangan wilayah menurut Myrdal berakar pada persoalan non ekonomi dan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif ini mendorong terpusatnya pembangunan pada wilayah-wilayah yang memberikan harapan laba yang tinggi, sedangkan wilayah-wilayah yang tidak menjanjikan laba yang tinggi akan tetap terbelakang atau mengalami stagnasi (Myrdal dalam Roudo, 2004:25).

Banyak sekali teori dan konsep yang berusaha menjelaskan mekanisme terjadinya kesenjangan serta mekanisme untuk mengurangi kesenjangan itu. Teori *polarization effect* misalnya menjelaskan kecenderungan semakin besarnya kesenjangan akibat terjadinya aliran faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah maju, sementara teori *trickling down effect* menjelaskan kecenderungan kesenjangan yang semakin mengecil karena berpindahannya sumber daya (terutama modal) ke wilayah yang terbelakang akibat sudah tidak efisiennya lagi ekonomi di wilayah yang sudah maju. Dalam konsep yang lain namun masih dalam gagasan yang sama, fenomena membesarnya kesenjangan disebut sebagai akibat dari terjadinya *backwash effect*, sedangkan fenomena mengecilnya kesenjangan adalah akibat terjadinya *spread effect*. Pandangan optimis diwakili oleh Hirschman yang berpendapat bahwa pada suatu saat *trickling down effect* akan bekerja lebih kuat daripada *polarization effect* (sehingga kesenjangan akan berkurang), sementara Myrdal mewakili pandangan yang lebih pesimis karena menurutnya *backwash effect* akan selalu lebih besar daripada *spread effect* (yang artinya kesenjangan akan cenderung semakin besar).

Jadi permasalahannya meskipun kesenjangan adalah suatu keniscayaan dalam perkembangan wilayah, namun kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan (divergensi) atau semakin mengecilnya kesenjangan (konvergensi) selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Kuznets yang merupakan pelopor dalam analisis empirik terhadap pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, menemukan bahwa pada tahap-tahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, tetapi akan membaik pada tahap-tahap berikutnya. Observasi inilah yang dikenal luas sebagai konsep kurva U-terbalik dari Kuznets (Kuncoro, 2004:129).

Pada tingkat wilayah atau regional, adalah Williamson yang mencoba memahami fenomena divergensi dan konvergensi wilayah secara empirik, yaitu dengan mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan (dinyatakan dengan PDRB) yang berbeda (Nurzaman, 2002:95). Williamson menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas atau kesenjangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang, tampak adanya keseimbangan antar-daerah dan disparitas berkurang secara signifikan (Kuncoro, 2004:133). Dapat dikatakan bahwa Williamson adalah yang pertama kali secara eksplisit memberi dimensi spasial kepada kurva U-terbaliknya Kuznets, yaitu dengan tidak memfokuskan kepada kesenjangan pendapatan rumah tangga melainkan kepada kesenjangan antar-wilayah di tingkat pendapatan perkapita.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geo-strategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah, harus dapat didukung dengan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan pembangunan dimasing-masing daerah. Hal ini mengingat bahwa, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan oleh karenanya dalam menyusun usulan program/kegiatan yang akan dirumuskan tidak dapat disamaratakan (simetris) dan harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah (asimetris).

Selanjutnya untuk dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk masing-masing daerah, khususnya yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah baik melalui pendekatan statistik maupun spasial. Sejalan dengan hal tersebut, Kedepatian Bidang Pengembangan Regional, telah melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan di atas, dan untuk selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka merumuskan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah.

2.2. Tujuan

- (1). Mengumpulkan dan menganalisis data-data statistik yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder;
- (2). Memetakan data-data yang diperoleh dari hasil analisis statistik/tabular ke dalam bentuk *Geographic Information System* (GIS);
- (3). Melaksanakan FGD dengan daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.
- (4). Melaksanakan konsinyiring/*workshop* di pusat (Jakarta), tujuannya adalah untuk memperoleh berbagai masukan/saran untuk penyempurnaan penyusunan PrADa, termasuk membahas hasil-hasil pelaksanaan FGD di daerah;
- (5). Menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk indikasi program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah;
- (6). Menyusun laporan PrADa dalam rangka, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertajam perencanaan pembangunan nasional yang berbasis kewilayahan.

1.3. Manfaat

Manfaat dari terlaksana dan tersusunnya PrADa ini, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan nasional/daerah, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan utamanya dalam menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Disamping itu model analisis melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan PrADa ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Bab-2

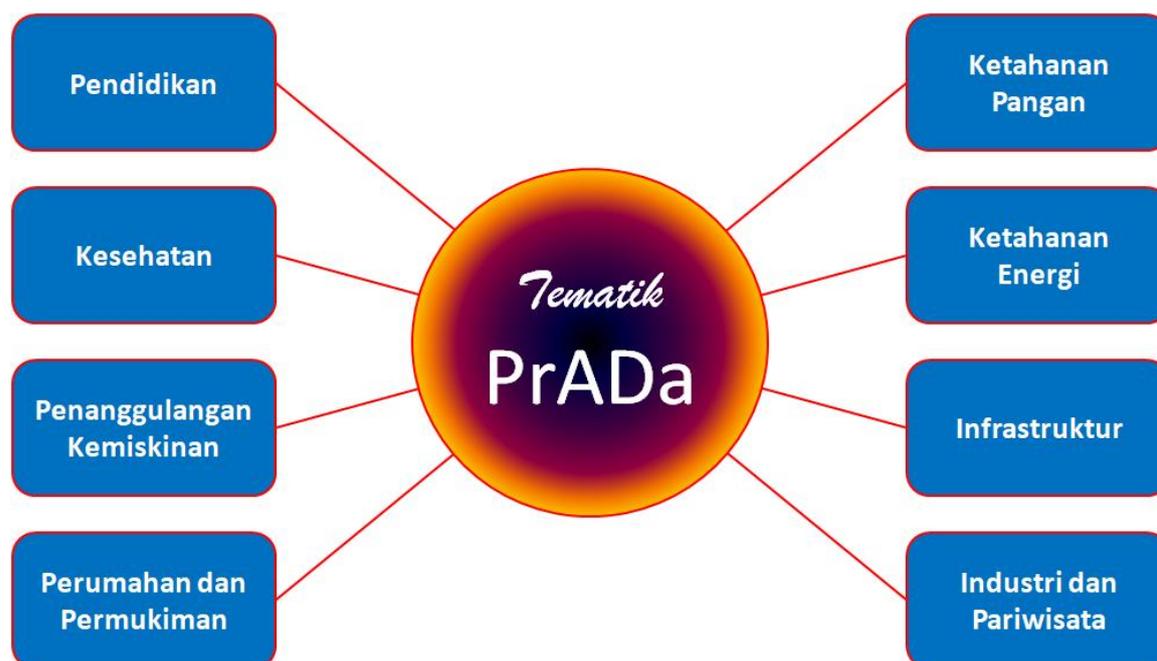
METODOLOGI



2.1. Lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan PrADa ini akan difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Gambar 2.1
Lingkup Tematik Penyusunan PrADa

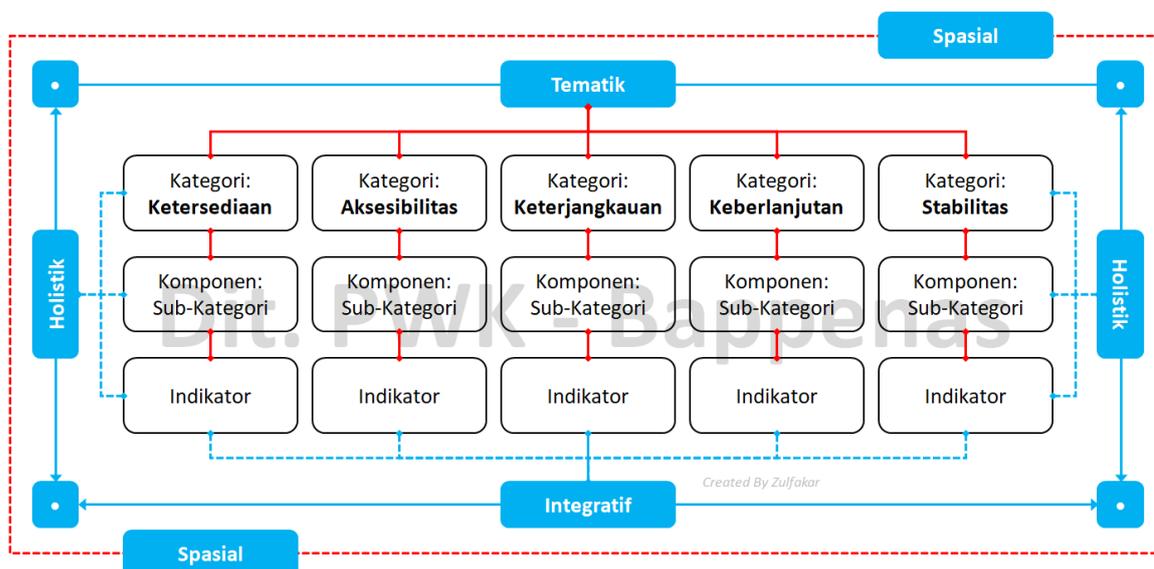


2.2. Metode Analisis

Model analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini melalui metode analisis dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun yang dimaksud dengan "**Tematik**" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan; "**Holistik**" adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan; "**Integratif**" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan; dan "**Spasial**" adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Gambar 2.2
Metode Analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)
Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Lingkup substantif suatu tematik dalam kegiatan ini, dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori yang saling terkait satu sama lainnya (baik secara vertical maupun horizontal), yaitu (1) **ketersediaan**, digunakan untuk menganalisis ketersediaan layanan suatu tematik; (2) **aksesibilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses, memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (3) **keterjangkauan**, dipergunakan untuk menganalisis keterjangkauan masyarakat dari sisi biaya dalam rangka memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (4) **keberlanjutan**, digunakan untuk menganalisis jaminan keberlanjutan terhadap layanan suatu tematik; dan (5) **stabilitas**, digunakan untuk menganalisis tingkat resiko bencana yang dapat menyebabkan terhentinya layanan suatu tematik. Selanjutnya penerapan metode analisis melalui pendekatan THIS ini, sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.2 tersebut diatas, secara ilustratif diuraikan sebagai berikut:

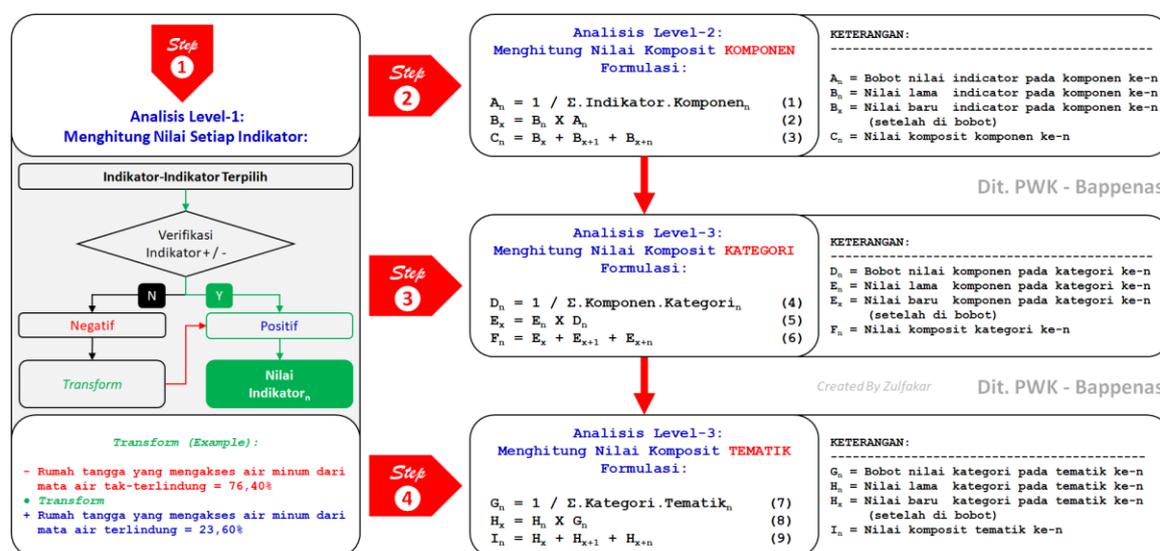
- **Analisis Tematik (Subject)**

Tematik dalam kegiatan ini difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

- **Analisis Holistik (*Technocratic Planning*),**

Analisis holistik (*technocratic planning*), merupakan metode analisis hulu-hilir (komprehensif) yang secara **vertical** dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, mulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis holistik ini disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Formulasi Analisis Holistik (*Technocratic Planning*)
Penyusunan PrADa



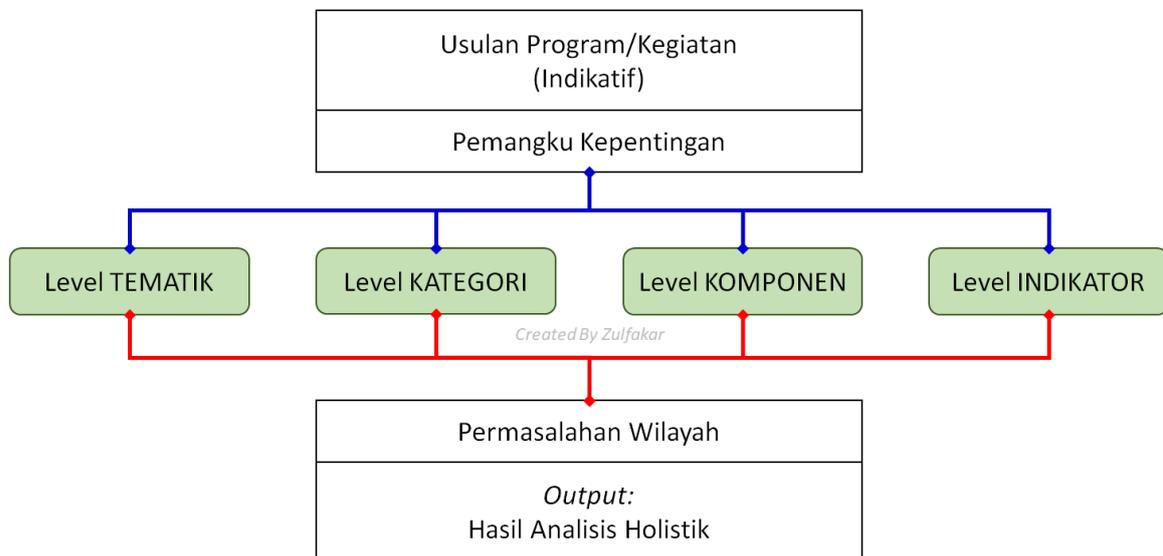
Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- **Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)**

Analisis integratif (*coordination/who's doing what*), merupakan metode analisis yang secara **horizontal** digunakan untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, disertai dengan pemetaan peran dari para pemangku kepentingan dan pendanaannya (*optional*), mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik.

Dalam menerapkan analisis integratif ini terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan analisis holistik. Hasil analisis holistik inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut dan peran para pemangku kepentingan sesuai tingkat permasalahannya, mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis integratif ini disajikan pada gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.4
Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)
Penyusunan PrADa

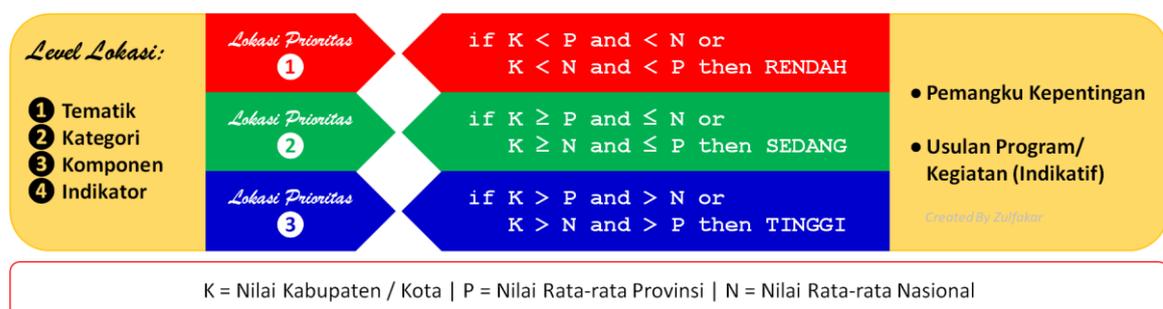


Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

- **Analisis Spasial (*Spatially Bound*)**

Analisis spasial (*spatially bound*) merupakan metode analisis yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi prioritas, yang akan terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu daerah dengan tingkat capaian rendah, sedang dan tinggi. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis spasial ini disajikan pada Gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5
Analisis Spasial (*Spatially Bound*) Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Bab-3

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL Provinsi Maluku



3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Maluku ²

Secara kumulatif, perekonomian provinsi Maluku tahun 2017 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku tahun 2017 mencapai 5,81%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,73%. Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,07%. Secara nominal pada tahun 2017, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) provinsi Maluku tercatat sebesar Rp. 39,88 triliun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp. 27,81 triliun.

Indikator	2014				2015				2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Ekonomi Makro Regional																
Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun Dasar 2010 (% yoy)	8.90	7.44	6.81	3.70	4.13	5.54	5.64	6.54	5.61	6.06	5.53	5.74	6.62	5.75	5.83	5.11
Berdasarkan Sektor																
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.22	6.49	7.44	2.45	2.69	2.01	0.45	(0.10)	1.79	2.80	6.36	7.99	8.74	6.38	4.69	4.29
2 Pertambangan dan Penggalian	21.38	19.28	24.14	21.04	2.59	(3.72)	(4.15)	1.68	5.99	4.07	2.65	3.05	5.21	6.74	(1.56)	(8.81)
3 Industri Pengolahan	13.18	8.57	8.53	4.04	3.41	4.28	2.16	5.75	8.49	7.42	7.45	4.94	4.48	4.19	4.74	5.57
4 Pengadaan Listrik dan Gas	25.97	31.55	38.12	51.77	61.05	(13.77)	(16.44)	(4.61)	(25.72)	43.67	34.85	7.38	3.55	(6.23)	(5.58)	(1.32)
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.61	6.64	4.77	5.40	(0.26)	2.76	0.88	(1.13)	1.95	2.01	4.63	7.64	4.93	3.56	7.44	5.72
6 Konstruksi	11.18	9.12	6.37	3.18	2.36	3.16	6.45	9.90	5.50	7.58	4.51	2.63	4.46	3.03	7.46	7.60
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	5.48	4.75	4.46	1.74	5.82	8.67	7.27	6.77	5.11	5.56	4.43	8.46	8.21	8.86	12.67	6.85
8 Transportasi dan Pergudangan	11.89	9.22	7.87	6.34	3.94	6.11	5.15	5.11	4.36	4.49	4.01	3.23	4.63	3.60	3.79	2.95
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.27	4.17	5.65	2.80	3.63	7.36	8.04	11.68	7.35	0.14	(2.20)	(5.41)	1.35	3.66	6.02	6.09
10 Informasi dan Komunikasi	9.94	9.19	6.11	5.53	7.72	10.82	9.08	8.47	6.67	6.55	9.43	8.94	10.23	7.14	4.63	2.66
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	4.81	5.98	4.14	10.54	11.06	2.08	10.01	6.15	8.11	16.95	6.44	6.02	2.35	3.91	4.04	7.00
12 Real Estate	9.63	8.93	6.95	3.24	3.62	3.60	2.40	1.78	1.85	1.83	2.27	3.06	2.83	2.81	2.86	2.24
13 Jasa Perusahaan	4.42	4.79	5.71	4.39	4.86	4.48	2.75	1.68	1.30	1.23	2.09	4.13	4.04	4.60	5.61	5.44
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.08	6.99	5.22	1.17	3.80	10.22	11.53	13.96	10.00	8.73	5.18	3.22	6.22	5.26	5.14	6.86
15 Jasa Pendidikan	9.79	11.81	9.34	7.27	6.06	6.56	8.70	9.95	6.69	7.64	8.71	8.76	6.29	5.78	4.63	5.82
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.91	2.16	2.68	2.76	1.49	5.28	5.71	6.85	5.44	5.54	4.87	6.24	5.07	4.72	4.01	3.91
17 Jasa lainnya	9.95	8.35	3.51	0.89	0.96	4.18	6.86	5.95	4.72	4.83	5.34	6.87	6.10	4.93	3.63	2.63
Berdasarkan Permintaan																
- Konsumsi Rumah Tangga	5.75	5.88	4.96	6.49	7.23	7.71	7.24	8.24	8.41	7.90	5.43	2.43	4.20	4.76	6.35	6.28
- Konsumsi Nirlaba	11.08	4.68	1.72	3.90	(5.62)	3.47	8.62	14.59	7.36	8.07	9.74	8.08	9.93	7.39	3.59	0.25
- Konsumsi Pemerintah	4.02	(0.71)	2.97	7.00	10.36	8.57	8.42	7.43	12.11	7.47	5.80	5.34	7.55	8.34	3.58	0.48
- PMTB	4.36	10.36	5.21	2.28	(6.06)	4.49	6.45	10.14	9.54	7.16	7.25	5.63	5.97	6.12	5.64	2.26
- Perubahan Stok	(11.95)	8.43	76.43	31.46	(57.64)	(62.61)	(51.52)	62.70	5.88	4.14	1.72	4.16	4.33	4.45	7.35	7.51
- Ekspor	(5.91)	(31.84)	(11.52)	(15.72)	23.76	(6.90)	(12.27)	4.16	(3.03)	(6.88)	0.96	0.25	4.25	9.73	3.28	0.26
- Impor	4.23	(10.40)	(3.49)	7.80	7.80	7.75	1.73	2.87	(1.02)	(3.87)	1.43	0.33	1.63	6.95	10.05	10.05
Ekspor																
- Nilai Ekspor Non Migas (USD juta)	29.51	26.61	30.76	27.75	11.11	5.37	3.09	2.95	4.43	7.12	8.76	11.10	11.15	13.22	11.44	8.43
- Volume Ekspor Non Migas (Ribu Ton)	82.74	39.62	43.76	35.90	13.99	3.73	0.27	0.53	0.63	1.92	2.04	3.61	4.89	5.57	4.58	4.57
Impor																
- Nilai Impor Non Migas (USD juta)	3.62	2.54	1.17	0.21	5.94	-	0.25	0.03	-	0.02	0.36	12.70	0.60	0.27	92.44	9.51
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	7.82	5.54	0.65	0.08	6.27	-	0.23	0.10	-	0.03	0.38	10.14	0.18	0.18	5.50	0.88

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

1 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perlambatan laju pertumbuhan disebabkan oleh melambatnya kinerja Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto. Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto merupakan tiga komponen dengan pangsa terbesar pada PDRB Maluku, dengan pangsa masing-masing sebesar 68,09%, 42,63% dan 31,29%. Realisasi Konsumsi Pemerintah provinsi Maluku pada triwulan IV-2017 tumbuh sebesar 0,48%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 3,58%. Turunnya pertumbuhan pada Konsumsi Pemerintah disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan Konsumsi Individu Pemerintah provinsi Maluku selama triwulan laporan, yaitu sebesar 0,17%.

² Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

Selanjutnya, menurunnya Konsumsi Pemerintah juga dapat ditinjau dari sisi anggaran. Dari sisi anggaran, pagu anggaran APBN untuk Maluku pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,57% menjadi sebesar Rp. 7,24 triliun, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 7,92 triliun. Hal ini menyebabkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dari pemerintah pusat terkait dengan investasi melalui Belanja Modal dan Belanja Barang lebih terbatas. Hal tersebut ditunjukkan oleh realisasi belanja pemerintah hingga akhir triwulan IV-2017 yang tercatat mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan dimaksud dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai pada periode ini dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Ditinjau dari realisasi APBD, menurunnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2017 juga dipengaruhi oleh rendahnya realisasi anggaran di semua komponen belanja pemerintah, mulai dari belanja operasional dan transfer, belanja modal dan belanja tidak terduga dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

2 Perkembangan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Di sisi lapangan usaha, perlambatan pada triwulan IV-2017 dipengaruhi oleh melambatnya kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Tiga lapangan usaha yang memiliki pangsa terbesar di provinsi Maluku dari sisi sektoral adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dengan pangsa masing-masing terhadap PDRB sebesar 23,29%, 22,59% dan 13,71%. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh sebesar 4,29% pada triwulan IV-2017, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 4,69%. Sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh 6,85%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 12,67%.

Perbaikan kinerja pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terlihat dari peningkatan angka produksi ikan segar, kopra dan kelapa hibrida yang cukup signifikan pada triwulan laporan. Perbaikan kinerja ini antara lain disebabkan oleh membaiknya cuaca di provinsi Maluku selama triwulan laporan. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga memicu pelemahan pertumbuhan pada triwulan IV-2017 yang disebabkan oleh berkurangnya produksi mineral pada periode laporan. Sementara itu, lapangan usaha Konstruksi dan Jasa Pendidikan memperlihatkan kinerja pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Beberapa proyek besar seperti proyek pembangunan rumah sakit, hotel dan pelabuhan mendorong pertumbuhan pada lapangan usaha Konstruksi.

3.2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan provinsi Maluku periode Maret 2017, lebih tinggi dari nasional, yaitu sebesar 18.45% dan nasional 10,64%. Sementara itu, untuk tingkat kemiskinan kabupaten/kota di wilayah provinsi Maluku disajikan sebagai berikut:

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Periode Maret 2017						
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional						
NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Index Kedalaman Kemiskinan (P1)	Index Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
01.	Maluku Barat Daya	21.94	30.18	6.51	1.89	374,816.00
02.	Maluku Tenggara Barat	30.67	27.47	5.29	1.52	339,801.00
03.	Kepulauan Aru	25.36	27.13	5.56	1.69	352,151.00
04.	Seram Bagian Barat	43.44	25.49	4.48	1.18	350,853.00
05.	Kota Tual	17.09	24.00	4.46	1.22	372,731.00
06.	Maluku Tenggara	23.69	23.87	2.90	0.57	373,386.00
07.	Seram Bagian Timur	26.23	23.59	4.87	1.57	334,645.00
08.	Maluku Tengah	78.72	21.20	4.17	1.25	424,632.00
09.	Buru	23.44	17.40	2.74	0.69	415,403.00
10.	Buru Selatan	10.28	16.83	2.37	0.48	542,036.00
11.	Kota Ambon	19.64	4.46	0.42	0.08	514,690.00
MALUKU		320.51	18.45	3.50	0.99	436,865.00
INDONESIA		7,771.00	10.64	1.83	0.48	361,496.00
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di ATAS provinsi dan nasional.						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di BAWAH provinsi, akan tetapi berada di ATAS nasional.						
Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di BAWAH provinsi dan nasional.						

3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia provinsi Maluku pada tahun 2016 menempati urutan ke 25 dari 34 provinsi, dengan nilai IPM sebesar 67,60 atau lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 70,18. Sementara itu, untuk indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di wilayah provinsi Maluku disajikan sebagai berikut:

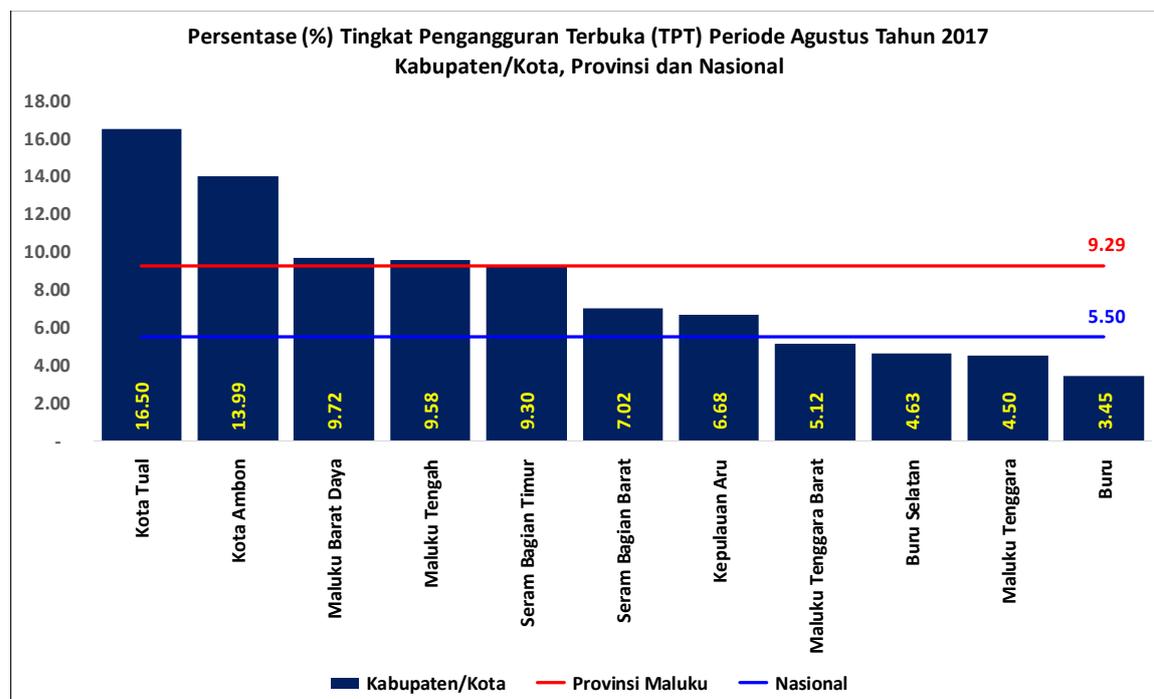
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Tahun 2016							
Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional							
NO.	Kabupaten/Kota	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (Ribu Rp/Tahun)	IPM	Pertumbuhan (Persen)
01.	Maluku Barat Daya	61.37	11.78	7.85	6,298.00	59.43	1.35
02.	Maluku Tenggara Barat	62.93	12.25	8.99	5,901.00	61.12	1.42
03.	Seram Bagian Timur	58.32	11.99	7.53	8,848.00	61.15	1.46
04.	Kepulauan Aru	62.16	11.41	8.39	7,080.00	61.32	1.35
05.	Buru Selatan	65.60	12.22	6.96	7,175.00	62.19	1.15
06.	Seram Bagian Barat	60.72	13.24	8.43	8,121.00	63.76	1.18
07.	Maluku Tenggara	64.45	12.40	9.17	7,063.00	64.20	1.34
08.	Kota Tual	64.33	13.87	9.76	6,803.00	65.64	0.68
09.	Buru	65.82	12.52	7.67	9,806.00	66.63	1.33
10.	Maluku Tengah	65.93	13.77	9.18	9,672.00	69.54	1.01
11.	Kota Ambon	69.74	15.90	11.64	13,497.00	79.55	0.32
MALUKU		65.35	-	-	8,215.00	67.60	0.81
INDONESIA		70.90	12.72	7.95	104,201.00	70.18	0.91

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di BAWAH provinsi DAN nasional.
	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di ATAS provinsi, akan tetapi berada di BAWAH nasional.
	Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota, di ATAS provinsi DAN nasional.

3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

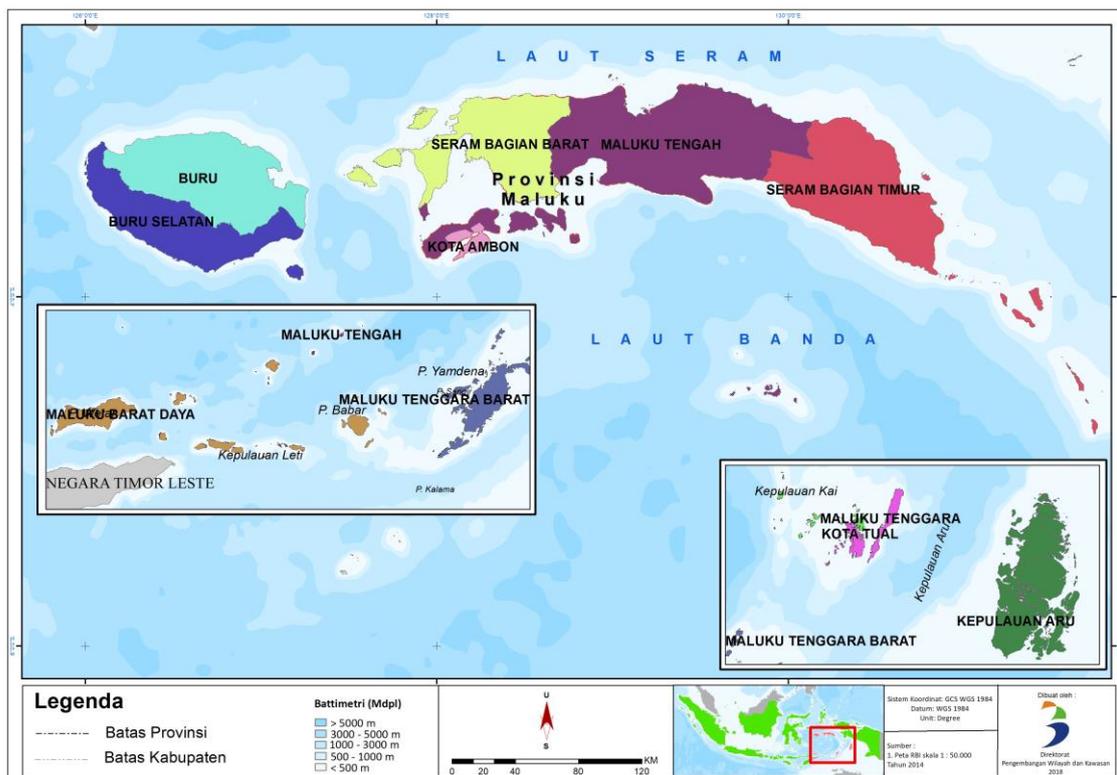
Tingkat pengangguran terbuka provinsi Maluku periode Agustus 2017, lebih tinggi dari nasional, yaitu sebesar 9,29% dan nasional 5,50%. Sementara itu, untuk tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di wilayah provinsi Maluku disajikan sebagai berikut:



Bab-4

PrADa

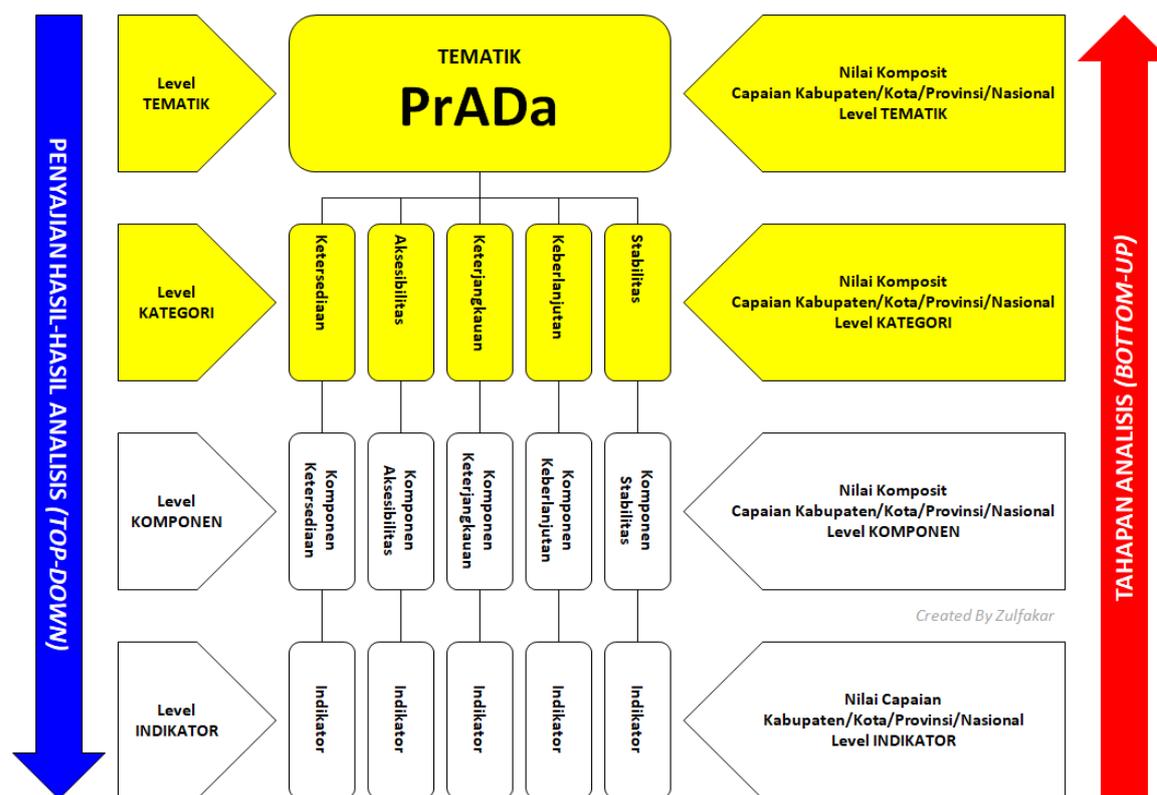
Provinsi Maluku



Model analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini dilakukan melalui pendekatan metode analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematiknya adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, infrastruktur, ketahanan energi, industri dan pariwisata.

Holistik (*technoratic planning*) terbagi ke dalam 4 level analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dimulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik (*bottom-up*). Integratif (*coordination/who's doing what*) untuk memetakan peran para pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Swasta) termasuk merumuskan program/kegiatan (indikatif), mulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik. Spasial (*spatially bound*) untuk memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat capaian terhadap indikator, komponen, kategori dan tematik rendah, sedang atau tinggi.

Gambar 4.1
Struktur dan Lingkup Penyajian Hasil Analisis
Penyusunan PrADa



Mengacu kepada Gambar 4.1 tersebut di atas, terlihat bahwa kalau dalam proses analisis menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), yang dimulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik, maka dalam penyajian hasil analisis justru sebaliknya, yaitu menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dimulai dari level tematik sampai dengan level kategori.

Analisis level tematik, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit suatu tematik dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit suatu tematik berasal dari 5 (lima) unsur kategori pembentuknya yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keterjangkauan, (4) keberlanjutan, dan (5) stabilitas.

Sementara itu, analisis level kategori, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit kategori dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit setiap kategori berasal dari masing-masing unsur komponen pembentuknya.

Adapun, dalam menentukan kabupaten/kota memiliki nilai komposit dengan tingkat capaian suatu tematik/kategori RENDAH, SEDANG dan TINGGI, ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota RENDAH**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih kecil dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih kecil dari nilai nasional DAN lebih kecil dari nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota SEDANG**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai provinsi DAN lebih kecil atau sama dengan nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai nasional DAN lebih kecil atau sama dengan nilai provinsi.

- **Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota TINGGI**

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar dari nilai nasional DAN lebih besar dari nilai provinsi.

4.1

Tematik:

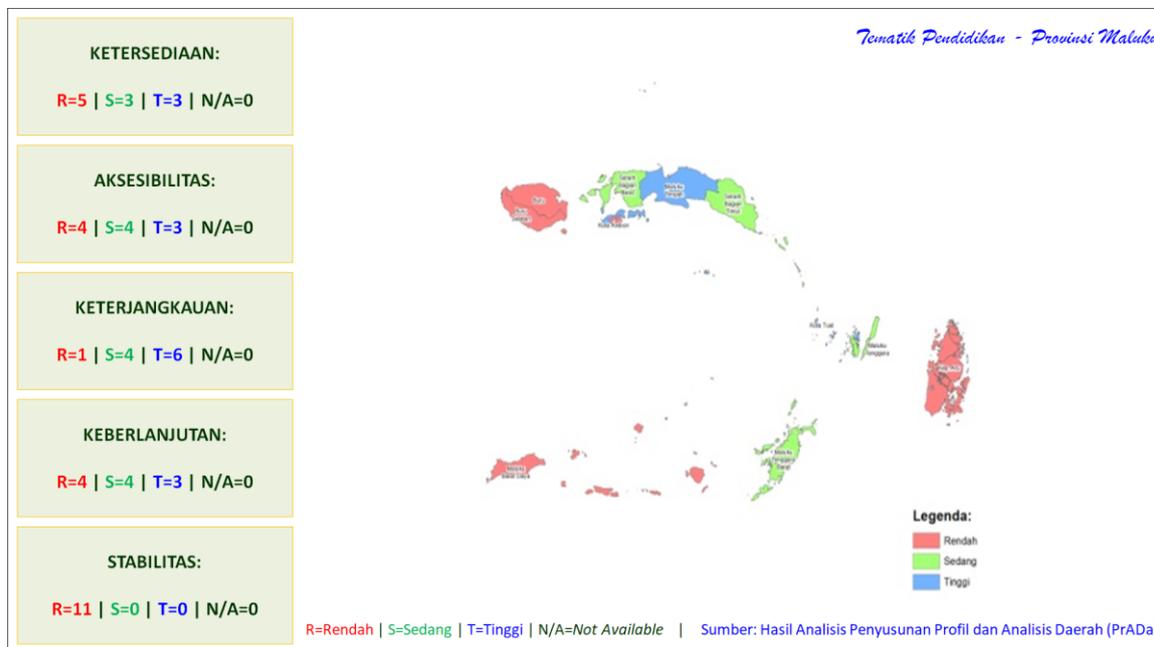
Pendidikan

Provinsi Maluku



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Pendidikan Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Murid • Guru • Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio siswa/rombel SD; • Rasio siswa/rombel SMP; • Rasio siswa/rombel SMA; • Rasio rombel/ruang kelas SD; • Rasio rombel /ruang kelas SMP; • Rasio rombel /ruang kelas SMA; • Rasio siswa/guru SD; • Rasio siswa/guru SMP; • Rasio siswa/guru SMA. • Presentase guru SD kualifikasi; • Presentase guru SMP kualifikasi; • Presentase guru SMA kualifikasi. • Presentase kerusakan ruang kelas SD; • Presentase kerusakan ruang kelas SMP; • Presentase kerusakan ruang kelas SMA.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak layanan • Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata jarak SD/SMP/SMA; • Desa beraspal.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata pengeluaran keluarga untuk pendidikan per bulan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Murid SD/SMP/SMA;
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Pendidikan Provinsi Maluku



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pendidikan
01.	Kota Ambon	Rendah	Prioritas 1	<p>RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p>PENDIDIKAN</p> <p>KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p>MALUKU</p> <p>DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p>RENDAH HINGGA SEDANG</p> <p>RENDAH : 5 KABUPATEN/KOTA</p> <p>SEDANG : 4 KABUPATEN/KOTA</p> <p>TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Buru			
05.	Buru Selatan			
06.	Maluku Tenggara	Sedang	Prioritas 2	
07.	Seram Bagian Timur			
08.	Maluku Tenggara Barat			
09.	Seram Bagian Barat	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tengah			
11.	Kota Tual			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan
01.	Maluku Barat Daya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terbatasnya jumlah ruang kelas di beberapa kabupaten/kota untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk seluruh rombongan belajar; Tingkat kerusakan ruang kelas relatif tinggi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; Rasio siswa/guru relatif masih belum mencukupi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di beberapa kabupaten/kota; Kualifikasi guru minimal sarjana relatif sudah mencukupi, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; Kurangnya tenaga teknis guru di kabupaten/kota sebagai penambahan tenaga kerja PNS maupun non PNS; Masih banaknya guru yang belum bersertifikat pendidik. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Rehabilitasi ruang belajar; Renovasi sekolah; Perekrutan guru PNS; Pemberian beasiswa bagi guru; Sertifikasi guru; Peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kemen PAN RB; Pemerintah Daerah.
02.	Buru			
03.	Buru Selatan			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Seram Bagian Barat			
06.	Kota Ambon	Sedang	Prioritas 2	
07.	Kota Tual			
08.	Seram Bagian Timur			
09.	Kepulauan Aru	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tenggara			
11.	Maluku Tengah			

Legenda:

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

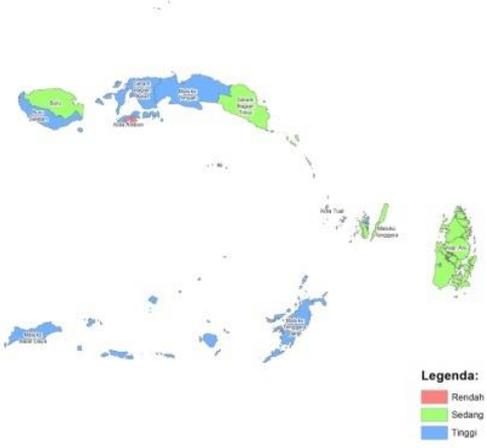
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

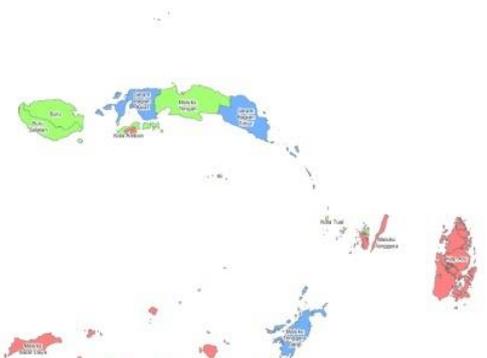
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan
01.	Kepulauan Aru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jarak dari desa ke sekolah, di beberapa kabupaten/kota masih relatif jauh. Minimnya kondisi jalan desa yang beraspal; Belum tersedianya sekolah dengan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA di beberapa kabupaten/kota. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Pembangunan jalan dan jembatan; Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi darat. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) di setiap desa/kelurahan; Pembangunan dan perbaikan jalan desa; Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah.
02.	Maluku Barat Daya			
03.	Buru Selatan			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
06.	Maluku Tengah			
07.	Seram Bagian Timur			
08.	Seram Bagian Barat			
09.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tenggara			
11.	Kota Tual			
<p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

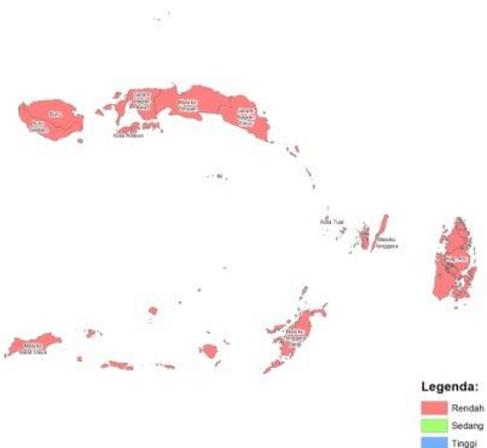
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan
01.	Kota Ambon	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rata-rata biaya pendidikan relatif dapat terjangkau di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, walaupun demikian di beberapa kabupaten/kota biaya pendidikan masih relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru	Sedang	Prioritas 2	
03.	Maluku Tenggara			
04.	Buru			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Maluku Barat Daya	Tinggi	Prioritas 3	
07.	Buru Selatan			
08.	Maluku Tengah			
09.	Kota Tual			
10.	Maluku Tenggara Barat			
11.	Seram Bagian Barat			
 <p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan
01.	Kota Ambon	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih tingginya jumlah siswa usia sekolah yang harusnya bersekolah di beberapa kabupaten/kota, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan proporsi anggaran pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan layanan pendidikan. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Tenggara			
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
06.	Buru Selatan			
07.	Maluku Tengah			
08.	Kota Tual			
09.	Seram Bagian Timur	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tenggara Barat			
11.	Seram Bagian Barat			
 <p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan
01.	Kota Ambon	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Tenggara			
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Buru			
06.	Buru Selatan			
07.	Maluku Tengah			
08.	Kota Tual			
09.	Seram Bagian Timur			
10.	Maluku Tenggara Barat			
11.	Seram Bagian Barat			
 <p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.2

Tematik:

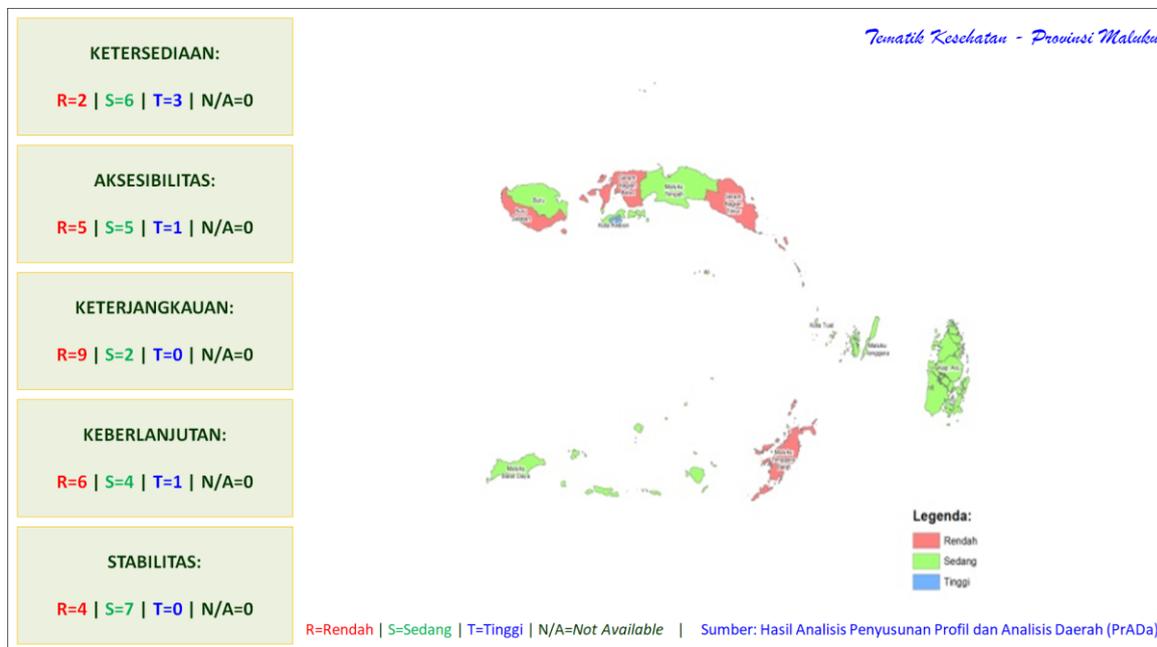
Kesehatan

Provinsi Maluku



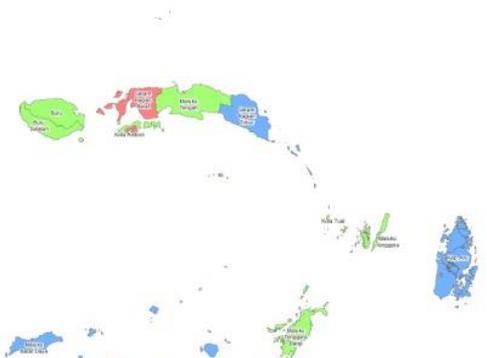
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Kesehatan Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kesehatan • Sarana Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio bidan per 100.000 penduduk; • Rasio dokter per 100.000 penduduk; • Rasio tenaga kesehatan lain per 100.000 penduduk. • Rasio posyandu per 3.000 penduduk; • Rasio puskesmas per 120.000 penduduk; • Rasio puskesmas pembantu per 3.000 penduduk; • Rasio rumah sakit per 240.000 penduduk.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kedekatan dengan fasilitas kesehatan terdekat 	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak ke puskesmas rawat inap; • Jarak ke puskesmas tanpa rawat inap; • Jarak ke puskesmas pembantu; • Jarak ke rumah sakit; • Jarak ke puskesmas praktik dokter.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan BPJS kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase kepemilikan BPJS kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjang ketersediaan tenaga kesehatan pada masa mendatang 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan perguruan tinggi di daerah yang memiliki jurusan dibidang kesehatan.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Kesehatan Provinsi Maluku



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Kesehatan
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 7 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 3 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Buru Selatan			
03.	Kota Tual			
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Maluku Tenggara Barat			
06.	Seram Bagian Barat			
07.	Seram Bagian Timur			
08.	Kepulauan Aru	Sedang	Prioritas 2	
09.	Maluku Tengah			
10.	Maluku Tenggara			
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan
01.	Kota Ambon	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan; • Belum meratanya penempatan dokter; • Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil; • Masih minimnya, kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan; - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan jaringannya. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah.
02.	Seram Bagian Barat			
03.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
04.	Buru Selatan			
05.	Kota Tual			
06.	Maluku Tengah			
07.	Maluku Tenggara			
08.	Maluku Tenggara Barat			
09.	Kepulauan Aru	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Barat Daya			
11.	Seram Bagian Timur			
 <p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

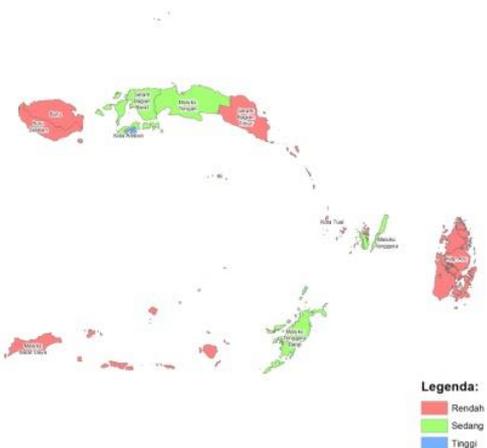
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya infrastruktur pendukung untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur pendukung. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pembangunan infrastruktur; • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
07.	Kota Tual			
08.	Maluku Tengah			
09.	Maluku Tenggara			
10.	Seram Bagian Barat	Tinggi	Prioritas 3	
11.	Kota Ambon			
<p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendah Sedang Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

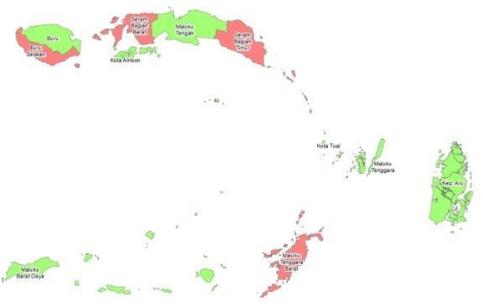
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kepemilikan BPJS kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi BPJS kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan BPJS kesehatan. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Pemerintah Daerah.
02.	Buru Selatan			
03.	Kota Tual			
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Maluku Tengah			
06.	Maluku Tenggara			
07.	Maluku Tenggara Barat			
08.	Seram Bagian Barat			
09.	Seram Bagian Timur			
10.	Kepulauan Aru	Sedang	Prioritas 2	
11.	Kota Ambon			
 <p style="text-align: center;">Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya perguruan tinggi/akademi di daerah yang memiliki jurusan bidang kesehatan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM kesehatan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan dan/atau peningkatan kuantitas dan kualitas jurusan bidang kesehatan pada perguruan tinggi/akademi di daerah. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan; - Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; - Pemerintah Daerah.
02.	Buru Selatan			
03.	Kepulauan Aru			
04.	Kota Tual			
05.	Maluku Barat Daya			
06.	Seram Bagian Timur			
07.	Maluku Tengah	Sedang	Prioritas 2	
08.	Maluku Tenggara			
09.	Maluku Tenggara Barat			
10.	Seram Bagian Barat			
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	
 <p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Maluku Tenggara Barat			
03.	Seram Bagian Barat			
04.	Seram Bagian Timur			
05.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
06.	Kepulauan Aru			
07.	Kota Ambon			
08.	Kota Tual			
09.	Maluku Barat Daya			
10.	Maluku Tengah			
11.	Maluku Tenggara			
 <p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.3

Tematik:

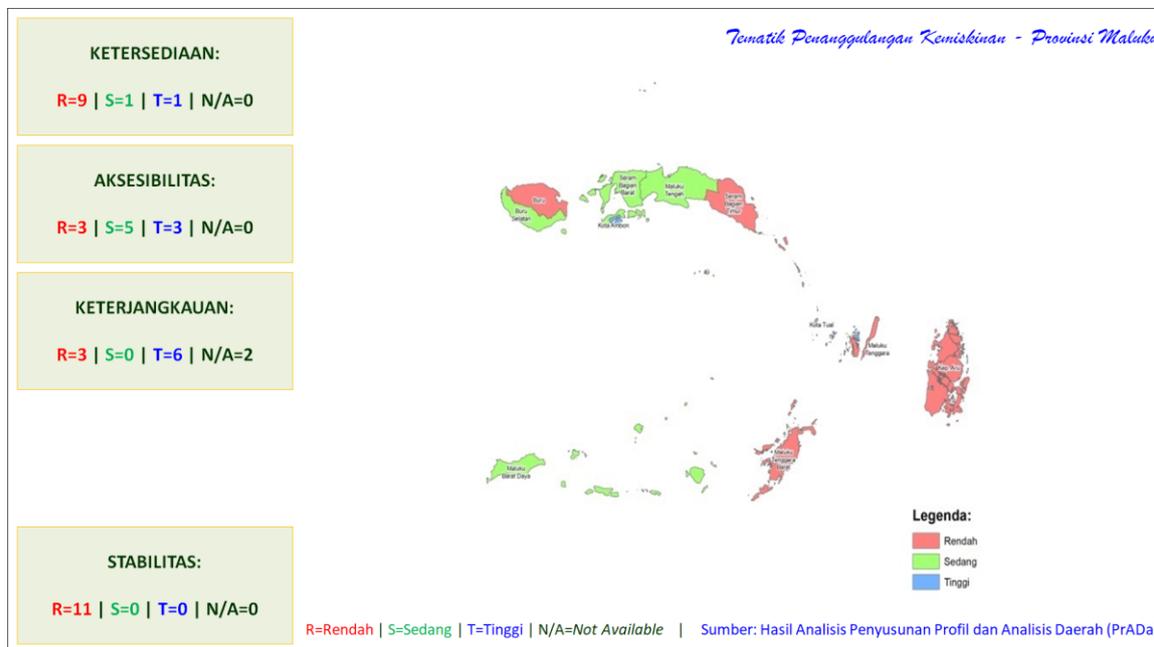
Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Maluku



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase kemiskinan (P0); • Indeks kedalaman kemiskinan (P1); • Indeks keparahan kemiskinan (P2).
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase jumlah anak miskin yang bersekolah; • Presentase individu miskin yang memiliki penyakit kronis; • Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah milik sendiri atau kontrak/sewa; • Presentase RTM yang menggunakan air minum layak; • Presentase RTM yang menggunakan jamban sendiri/bersama; • Presentase RTM yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan non PLN); • Kondisi jalan mantab.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Luas Layanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH); • Target PKH; • Presentase penerima PKH.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PENANGGULANGAN KEMISKINAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH HINGGA SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 5 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 4 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Tenggara			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Buru Selatan	Sedang	Prioritas 2	
07.	Maluku Barat Daya			
08.	Maluku Tengah			
09.	Seram Bagian Barat			
10.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	
11.	Kota Tual			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingginya persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di beberapa kabupaten/kota. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan sosial; Perlindungan dan jaminan sosial; Penanganan fakir miskin. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); Perlindungan sosial korban bencana alam; Perlindungan sosial korban bencana sosial; Jaminan sosial keluarga; Penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Sosial; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Maluku Tengah			
05.	Maluku Tenggara			
06.	Maluku Tenggara Barat			
07.	Seram Bagian Barat			
08.	Seram Bagian Timur			
09.	Kota Tual			
10.	Buru Selatan	Sedang	Prioritas 2	
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku

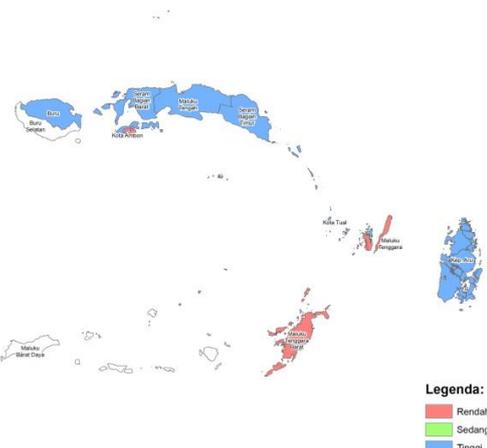
No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan			
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan, di beberapa kabupaten/kota. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pendidikan dasar dan menengah; Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; Pembinaan pelayanan kesehatan; Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; Pengembangan perumahan; Peningkatan layanan ketenagalistrikan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP); Pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pembangunan rumah susun; Penyediaan sanitasi layak; Peningkatan listrik desa. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; Pemerintah Daerah. 			
02.	Kepulauan Aru						
03.	Seram Bagian Timur						
04.	Buru Selatan	Sedang	Prioritas 2				
05.	Maluku Barat Daya						
06.	Maluku Tengah						
07.	Maluku Tenggara						
08.	Seram Bagian Barat						
09.	Maluku Tenggara Barat	Tinggi	Prioritas 3				
10.	Kota Ambon						
11.	Kota Tual						

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

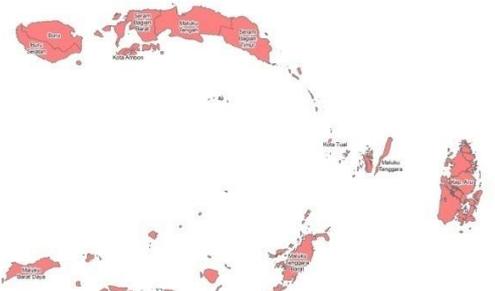
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Buru Selatan	N/A	-	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penerima manfaat program perlindungan dan jaminan sosial. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan dan jaminan sosial. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan tata kelola program perlindungan dan jaminan sosial; - Peningkatan pengawasan pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial; - Pemerintah Daerah.
02.	Maluku Barat Daya	N/A	-	
03.	Maluku Tenggara	Rendah	Prioritas 1	
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Kota Ambon			
06.	Buru	Tinggi	Prioritas 3	
07.	Kepulauan Aru			
08.	Maluku Tengah			
09.	Seram Bagian Barat			
10.	Seram Bagian Timur			
11.	Kota Tual			
 <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Buru Selatan			
03.	Kepulauan Aru			
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Maluku Tengah			
06.	Maluku Tenggara			
07.	Maluku Tenggara Barat			
08.	Seram Bagian Barat			
09.	Seram Bagian Timur			
10.	Kota Ambon			
11.	Kota Tual			
 <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendah Sedang Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.4

Tematik:

Perumahan dan Permukiman

Provinsi Maluku

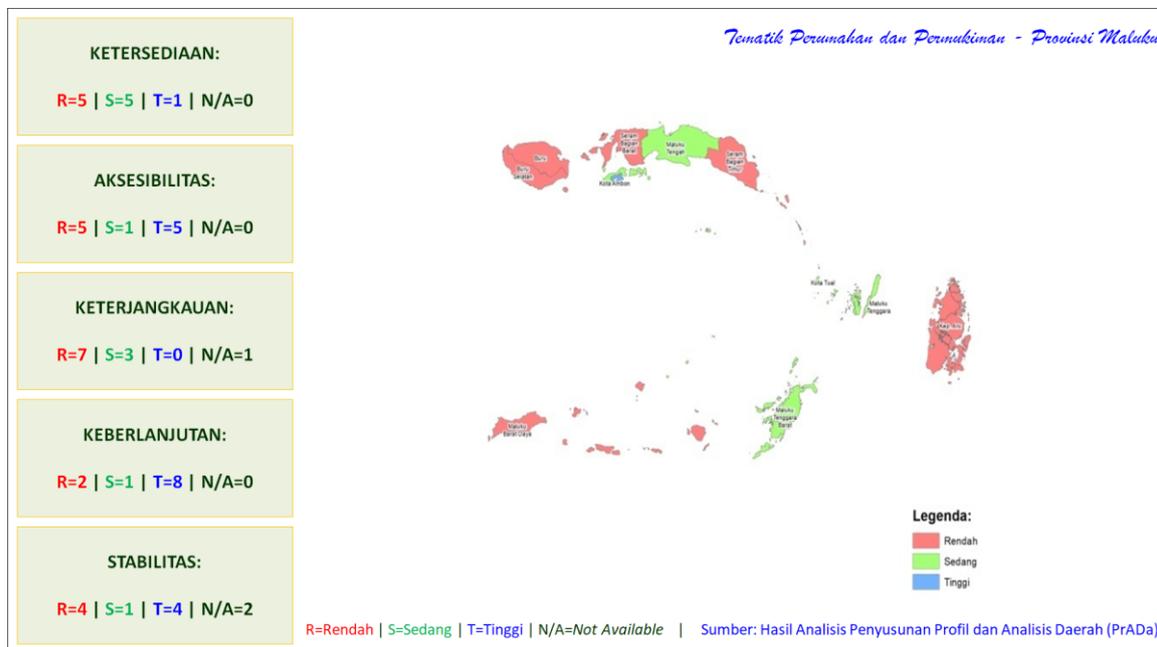


Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Persampahan • Ruang publik • Angkutan umum • Telekomunikasi • Jasa ekspedisi • Pertokoan • Keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat buang sampah sebagian besar keluarga; • Tempat penampungan sampah sementara (TPS). • Keberadaan ruang publik bagi warga untuk bersantai atau bermain tanpa perlu membayar. • Keberadaan angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Operasional angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; • Jam operasi angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan. • Keberadaan telepon koin dan kartu yang masih aktif atau berfungsi; • Keberadaan base transceiver station (BTS) atau menara telepon seluler; • Kondisi sinyal telepon seluler atau handphone. • Keberadaan warung internet (warnet) di desa atau kelurahan; • kantor pos, pos pembantu, rumah pos; • Keberadaan pelayanan pos keliling; • Keberadaan perusahaan jasa ekspedisi swasta. • Keberadaan kelompok pertokoan. • Keberadaan pos polisi termasuk kantor polisi.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses ke sumber air untuk minum • Akses ke sumber air untuk memasak • Akses ke sumber air untuk mandi, cuci, dll. • Sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk minum. • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk memasak. • Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, cuci, dll; • Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk mandi, cuci, dll. • Fasilitas tempat buang air besar, dan siapa saja yang menggunakan; • Jenis jamban, kloset yang digunakan rumah tangga; • Lokasi tempat pembuangan akhir tinja.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi • Status rumah • Kondisi rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga yang berlangganan telepon kabel. • Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. • Bahan bangunan utama atap rumah terluas; • Bahan bangunan utama dinding rumah terluas; • Bahan bangunan utama lantai rumah terluas.

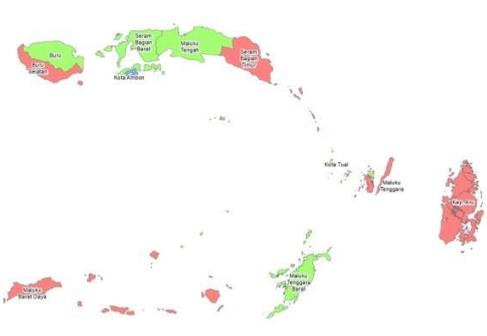
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> ● Air isi ulang ● Perpipahan ● Penerangan ● Energi memasak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cara memperoleh air minum yang bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang dan leding eceran. ● Sumber air minum, mandi, cuci, memasak menggunakan perpipaan atau hidran umum. ● Sumber penerangan utama rumah. ● Jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak.
<ul style="list-style-type: none"> ● Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Limbah ● Wilayah sutet ● Permukiman kumuh ● Modal sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Keberadaan permukiman di bantaran sungai; ● Pembuangan limbah pabrik, industri, usaha ke sungai. ● Keberadaan wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet). ● Keberadaan permukiman kumuh di desa atau kelurahan. ● Keberadaan kebiasaan gotong royong warga di desa atau kelurahan.
<ul style="list-style-type: none"> ● Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> ● Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; ● Keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; ● Keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan.

Hasil Analisis Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku

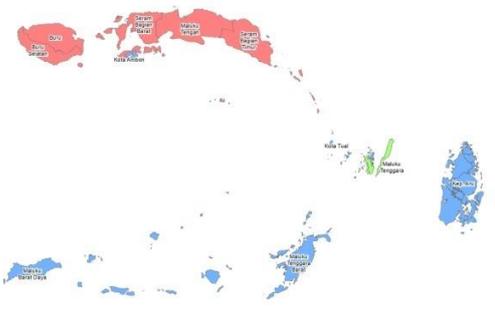


No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 6 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 4 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Buru Selatan			
03.	Kepulauan Aru			
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Seram Bagian Barat			
06.	Seram Bagian Timur			
07.	Maluku Tengah	Sedang	Prioritas 2	
08.	Maluku Tenggara			
09.	Maluku Tenggara Barat			
10.	Kota Tual			
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Kab. Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke dalam lubang, sungai, saluran irigasi, danau, laut, got dan selokan; Terbatasnya ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); Masih minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kawasan perumahan dan permukiman untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas pendukung kawasan perumahan dan dan permukiman. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle); Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); Penyediaan prasarana dan sarana untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah.
02.	Kab. Kepulauan Aru			
03.	Kab. Maluku Barat Daya			
04.	Kab. Maluku Tenggara			
05.	Kab. Seram Bagian Timur			
06.	Kab. Buru	Sedang	Prioritas 2	
07.	Kab. Maluku Tengah			
08.	Kab. Maluku Tenggara Barat			
09.	Kab. Seram Bagian Barat			
10.	Kota Tual			
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	
 <p style="text-align: right;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum utama yang berasal dari (1) sumur bor/pompa, mata air terlindung, yang jaraknya kurang dari 10 meter; (2) mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi); Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas buang air besar, karena faktor sosial budaya, atau dikarenakan tidak adanya fasilitas tempat buang air besar; Terbatasnya lokasi pembuangan akhir tinja yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan akhirnya di buang ke kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses ke sumber air untuk minum dan sanitasi layak. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses sumber air untuk minum bagi rumah tangga yang berasal dari leding; Optimalisasi ketersediaan air baku; Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Meningkatkan pelayanan kepada rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat; Membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal; Meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Kesehatan; BUMN/BUMD; Pemerintah Daerah.
02.	Buru Selatan			
03.	Maluku Tengah			
04.	Seram Bagian Barat			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Maluku Tenggara	Sedang	Prioritas 1	
07.	Kepulauan Aru	Tinggi	Prioritas 3	
08.	Maluku Barat Daya	Tinggi		
09.	Maluku Tenggara Barat	Tinggi		
10.	Kota Ambon	Tinggi		
11.	Kota Tual	Tinggi		
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku

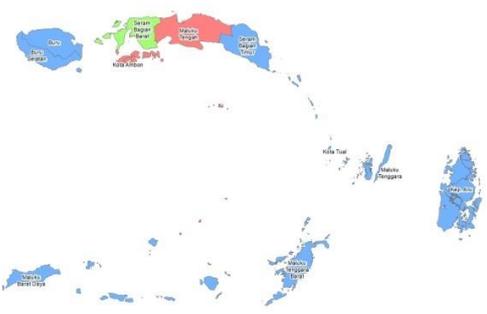
No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas bangunan rumah sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan, seperti (1) bahan bangunan utama atap rumah terluas berasal dari asbes, seng, bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya; (2) bahan bangunan utama dinding rumah terluas berasal dari plesteran anyaman bambu / kawat, kayu, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu; (3) bahan bangunan utama lantai rumah terluas berasal dari bambu, kayu / papan kualitas rendah, tanah, dan lainnya; Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan sumber air untuk minum, memasak, mandi dan cuci, berasal dari perpipahan atau hidran umum; Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan penerangan utama rumah berasal dari listrik; Masih banyak rumah tangga yang menggunakan bahan bakar utamanya berasal dari kayu bakar. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Memperluas jaringan distribusi air bersih bagi rumah tangga; Subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Maluku Tenggara			
05.	Maluku Tenggara Barat			
06.	Seram Bagian Barat			
07.	Seram Bagian Timur			
08.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
09.	Maluku Tengah			
10.	Kota Tual			
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Maluku Tengah	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat permukiman di bantaran sungai; • Banyak rumah tangga dan industri yang membuang limbah ke sungai; • Terdapat wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet); • Terdapat permukiman kumuh di desa atau kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Relokasi permukiman penduduk dan pemberdayaan masyarakat. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Relokasi permukiman dari bantaran sungai dan kumuh; - Pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah.
02.	Kota Ambon			
03.	Seram Bagian Barat	Sedang	Prioritas 2	
04.	Buru	Tinggi	Prioritas 3	
05.	Buru Selatan			
06.	Kepulauan Aru			
07.	Maluku Barat Daya			
08.	Maluku Tenggara			
09.	Maluku Tenggara Barat			
10.	Seram Bagian Timur			
11.	Kota Tual			
 <p style="text-align: center;">Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman
01.	Kepulauan Aru	N/A	-	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; • Minimnya keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; • Minimnya keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Maluku Tenggara	N/A	-	
03.	Buru	Rendah	Prioritas 1	
04.	Buru Selatan			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Kota Tual			
07.	Maluku Barat Daya	Sedang	Prioritas 2	
08.	Maluku Tengah	Tinggi	Prioritas 3	
09.	Maluku Tenggara Barat			
10.	Seram Bagian Barat			
11.	Kota Ambon			
<p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.5

Tematik:

Ketahanan Pangan

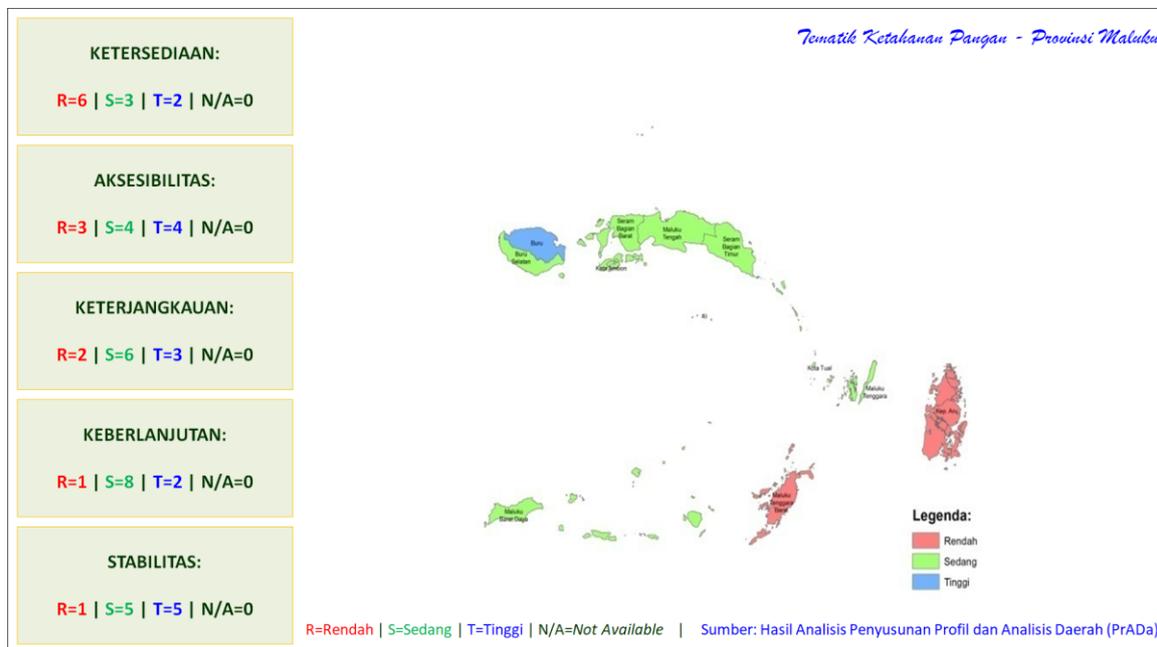
Provinsi Maluku



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan • Produksi peternakan • Konsumsi sereal • Lahan irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi perikanan tangkap; • Produksi perikanan budidaya. • Produksi ternak. • Konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih sereal. • Rasio luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; • Rasio luas sawah irigasi dibandingkan luas total sawah.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur • Akses ke pasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks kepadatan jalan; • Jalan mantab. • Rasio desa dengan bangunan pasar permanen/semi permanen; • Rata-rata perkiraan jarak ke pasar dengan bangunan permanen/semi permanen terdekat.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan • Pengeluaran perkapita • Kesehatan bayi 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kemiskinan; • Indeks kedalaman kemiskinan (P1); • Indeks keparahan kemiskinan (P2). • Pengeluaran perkapita. • Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR); • Bayi Gizi Buruk.

Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja Lahan pertanian Populasi peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio rumah tangga tanaman pangan (RTTP); Rasio rumah tangga perikanan budidaya; Rasio rumah tangga perikanan tangkap. Rasio luas lahan terhadap RTTP; Populasi ternak; Populasi unggas.
<ul style="list-style-type: none"> Stabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Kerawanan bencana banjir; Kerawanan bencana tanah longsor; Kerawanan bencana cuaca ekstrem; Kerawanan bencana kekeringan.

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Pangan
01.	Kepulauan Am	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KETAHANAN PANGAN</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 8 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Maluku Tenggara Barat	Rendah	Prioritas 1	
03.	Buru Selatan	Sedang	Prioritas 2	
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Maluku Tengah			
06.	Maluku Tenggara			
07.	Seram Bagian Barat			
08.	Seram Bagian Timur			
09.	Kota Ambon			
10.	Kota Tual			
11.	Buru	Tinggi	Prioritas 3	
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produksi perikanan tangkap/budidaya; • Rendahnya produksi ternak; • Konsumsi sereal lebih tinggi dibandingkan produksi di dalam kabupaten/kota; • Rendahnya persentase luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; • Rendahnya rasio sawah irigasi terhadap luas lahan sawah total. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan pangan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi hasil pertanian; - Penerapan teknologi pertanian; - Pemberdayaan penyuluh pertanian; - Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikanan; - Peningkatan produksi peternakan dan penerapan teknologi peternakan; - Peningkatan ketahanan pangan; - Pembukaan sawah dan pembuatan saluran irigasi. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Am			
03.	Maluku Tenggara			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Seram Bagian Barat			
06.	KotaTual			
07.	Maluku Barat Daya	Sedang	Prioritas 2	
08.	Seram Bagian Timur			
09.	Kota Ambon			
10.	Buru	Tinggi	Prioritas 3	
11.	MalukuTengah			

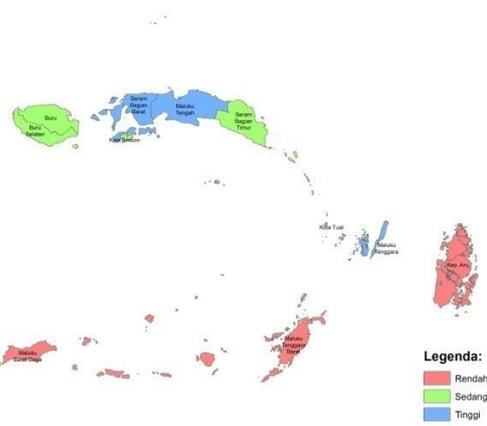
Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Kepulauan Am	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kepadatan jalan (panjang ruas jalan per 100 km² luas wilayah); • Rendahnya rasio jalan mantab; • Tingginya rasio desa tanpa bangunan permanen maupun semi permanen; • Jarak rata-rata desa ke pasar permanen/semi permanen terdekat terlampau jauh. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan pangan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan, pemeliharaan jalan; - Pembangunan pasar permanen/semi permanen; - Rehabilitasi bangunan pasar. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perdagangan; - Pemerintah Daerah.
02.	Maluku Barat Daya			
03.	Maluku Tenggara Barat			
04.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
05.	Buru Selatan			
06.	Seram Bagian Timur			
07.	Kota Ambon			
08.	Maluku Tengah	Tinggi	Prioritas 3	
09.	Maluku Tenggara			
10.	Seram Bagian Barat			
11.	Kota Tual			

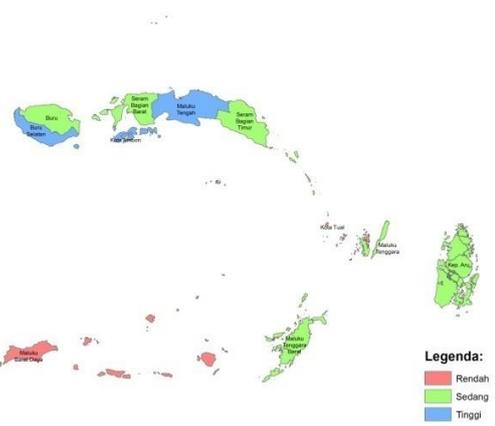


Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

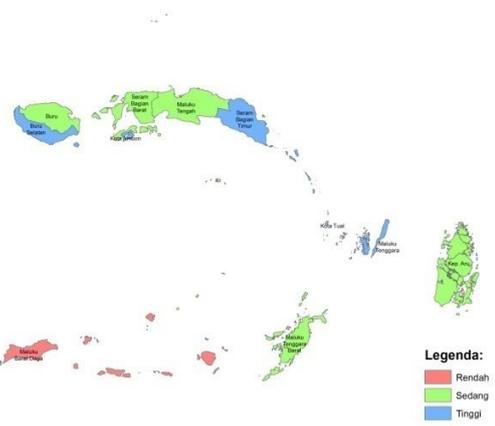
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Maluku Barat Daya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka kemiskinan; • Tingginya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan; • Pengeluaran per kapita di wilayah kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata provinsi; • Angka bayi yang kekurangan gizi masih tinggi; • Tingginya persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Penanggulangan kemiskinan. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin, khususnya yang bekerja di sektor pertanian; - Peningkatan kesehatan ibu dan bayi. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial; - Kementerian Kesehatan; - Pemerintah Daerah.
02.	KotaTual			
03.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
04.	Kepulauan Am			
05.	MalukuTenggara			
06.	MalukuTenggara Barat			
07.	Seram Bagian Barat			
08.	Seram Bagian Timur			
09.	Buru Selatan	Tinggi	Prioritas 3	
10.	MalukuTengah			
11.	Kota Ambon			
 <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendah Sedang Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan
01.	MalukuTengah	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya persentase rumah tangga tanaman pangan, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; • Rendahnya penguasaan lahan pertanian; • Laju konversi lahan pertanian yang belum diprediksi; • Rendahnya populasi ternak dan unggas. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kesejahteraan petani; - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; - Penataan ruang; - Pemberian bibit ternak dan unggas; - Penanggulangan penyakit ternak dan unggas. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Agraria dan Tata Ruang; - Pemerintah Daerah.
02.	Buru Selatan	Sedang	Prioritas 2	
03.	Kepulauan Am			
04.	MalukuTenggara			
05.	MalukuTenggara Barat			
06.	Seram Bagian Barat			
07.	Seram Bagian Timur			
08.	Kota Ambon			
09.	KotaTual			
10.	Buru			
11.	Maluku Barat Daya			
<p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan
01.	Kab. Maluku Barat Daya	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kerawanan bencana banjir; • Tingginya Kerawanan bencana Tanah longsor; • Tingginya Kerawanan bencana cuaca ekstrim; • Tingginya Kerawanan bencana kekeringan. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Kab. Buru	Sedang	Prioritas 2	
03.	Kab. Kepulauan Am			
04.	Kab. MalukuTengah			
05.	Kab. MalukuTenggara Barat			
06.	Kab. Seram Bagian Barat			
07.	Kab. Buru Selatan	Tinggi	Prioritas 3	
08.	Kab. MalukuTenggara			
09.	Kab. Seram Bagian Timur			
10.	Kota Ambon			
11.	KotaTual			
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.6

Tematik:

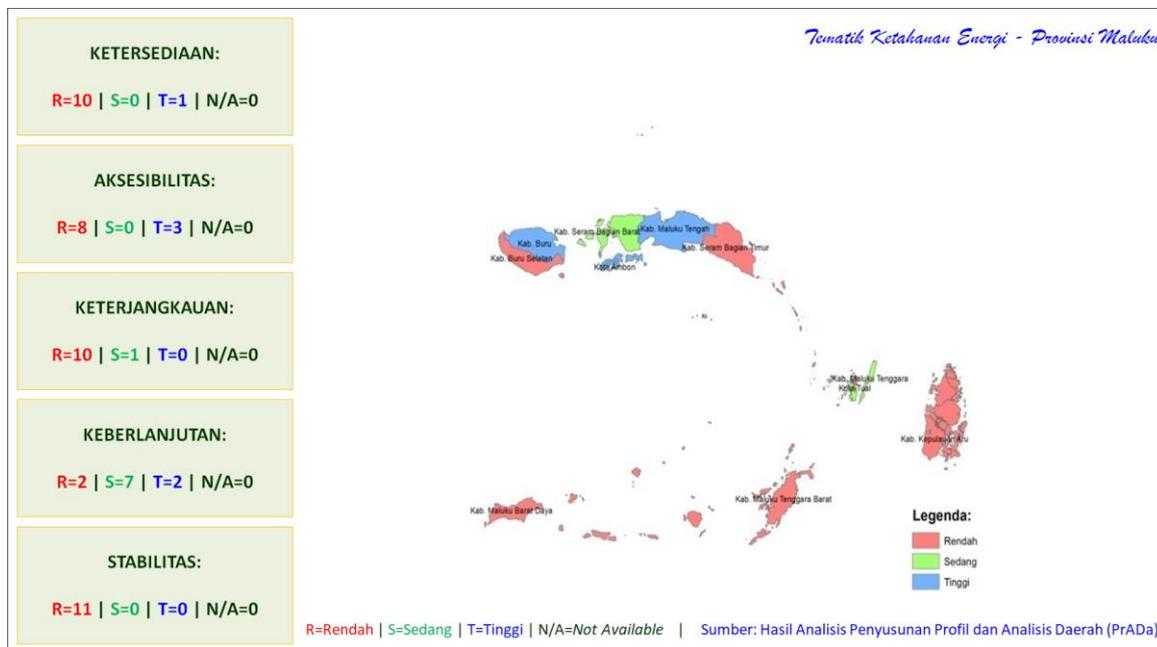
Ketahanan Energi

Provinsi Maluku



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Energi Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan pemerintah).
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN; • Keluarga pengguna listrik Non PLN; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan, listrik diusahakan pemerintah; • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah).
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 		<ul style="list-style-type: none"> • Bahan Bakar untuk memasak yang digunakan sebagian besar keluarga (gas kota, LPG, minyak tanah, kayu bakar); • Keluarga tanpa listrik; • Tidak ada penerangan di jalan utama desa/kelurahan.
<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan 		<ul style="list-style-type: none"> • Keluarga pengguna listrik PLN • Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah)
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

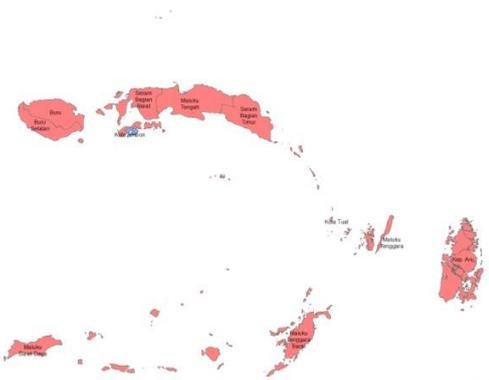
Hasil Analisis Tematik Ketahanan Energi Provinsi Maluku



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Ketahanan Energi
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">KETAHANAN ENERGI</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS,</p> <p style="text-align: center;">RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 6 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Maluku Tenggara			
05.	Maluku Tenggara Barat			
06.	Seram Bagian Timur			
07.	Seram Bagian Barat	Sedang	Prioritas 2	
08.	Kota Tual			
09.	Buru	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tengah			
11.	Kota Ambon			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ketersediaan jaringan listrik PLN di beberapa wilayah permukiman penduduk; • Minimnya ketersediaan lampu penerangan di beberapa jalan utama. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Ketahanan energi. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jaringan distribusi listrik PLN yang dapat menjangkau permukiman penduduk; - Pemasangan lampu penerangan di jalan utama. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; - Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Buru			
07.	Maluku Tengah			
08.	Maluku Tenggara			
09.	Seram Bagian Barat			
10.	Kota Tual			
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	



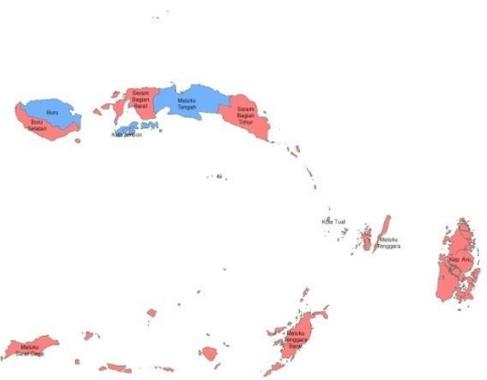
Legenda:

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sulitnya masyarakat mengakses listrik PLN, karena keterbatasan layanan sambungan listrik PLN; <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan listrik PLN; Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Maluku Tenggara			
07.	Seram Bagian Barat			
08.	Kota Tual			
09.	Buru	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tengah			
11.	Kota Ambon			

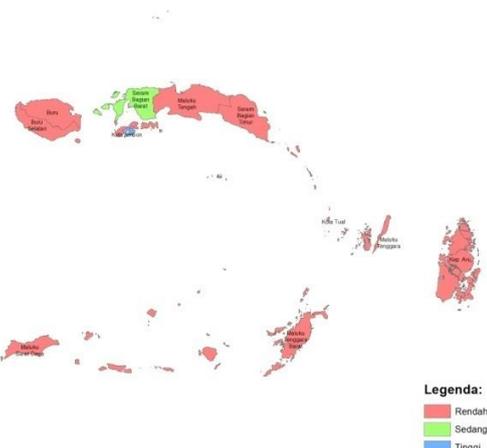


Legenda:

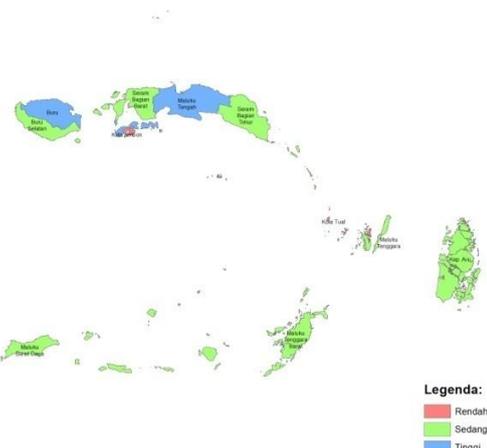
- Rendah
- Sedang
- Tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

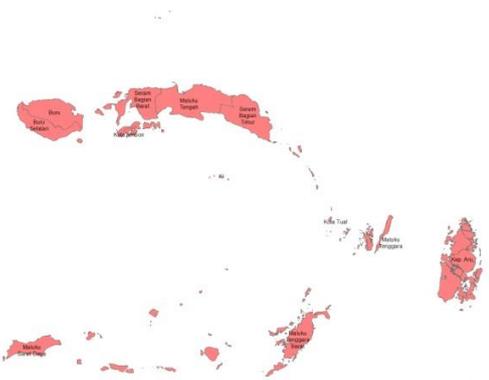
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar utama untuk memasak. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi penggunaan LPG dan bahan bakar efektif dan efisien untuk masyarakat. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Pemerintah Daerah.
02.	Kepulauan Aru			
03.	Maluku Barat Daya			
04.	Maluku Tenggara Barat			
05.	Seram Bagian Timur			
06.	Maluku Tenggara			
07.	Kota Ambon			
08.	Kota Tual			
09.	Buru			
10.	Maluku Tengah			
11.	Seram Bagian Barat	Sedang	Prioritas 2	
 <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendah Sedang Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi
01.	Kota Ambon	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beberapa kebutuhan energi listriknya terbantu dari supply non-PLN namun masih belum mencukupi seluruh kebutuhan energi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Ketahanan energi. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pihak swasta, untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Swasta; Pemerintah Daerah.
02.	Kota Tual			
03.	Buru Selatan	Sedang	Prioritas 2	
04.	Kepulauan Aru			
05.	Maluku Barat Daya			
06.	Maluku Tenggara			
07.	Maluku Tenggara Barat			
08.	Seram Bagian Barat			
09.	Seram Bagian Timur			
10.	Buru	Tinggi	Prioritas 3	
11.	Maluku Tengah			
 <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendah Sedang Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi
01.	Buru	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Buru Selatan	Rendah		
03.	Kepulauan Aru	Rendah		
04.	Maluku Barat Daya	Rendah		
05.	Maluku Tengah	Rendah		
06.	Maluku Tenggara	Rendah		
07.	Maluku Tenggara Barat	Rendah		
08.	Seram Bagian Barat	Rendah		
09.	Seram Bagian Timur	Rendah		
10.	Kota Ambon	Rendah		
11.	Kota Tual	Rendah		
 <p style="text-align: center;">Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.7

Tematik:

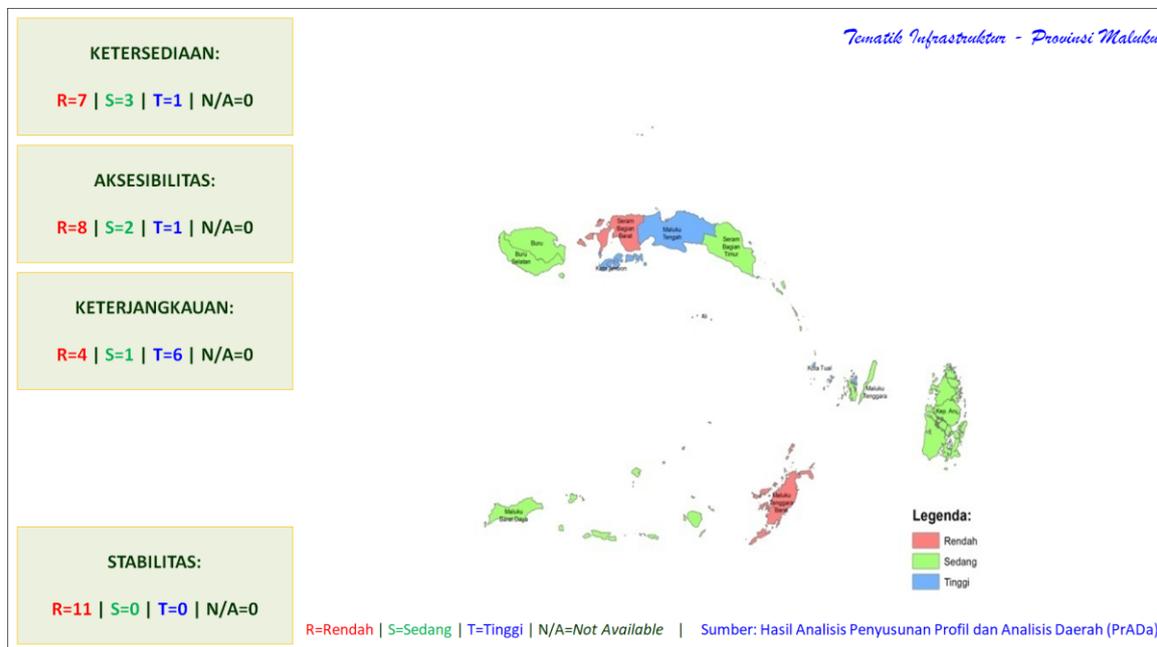
Infrastruktur

Provinsi Maluku



Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Infrastruktur Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan 		<ul style="list-style-type: none"> • Panjang ruas jalan nasional; • Panjang ruas jalan provinsi; • Rasio irigasi; • Frekuensi kapal datang; • Frekuensi kapal GT.
<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Rasio jalan mantab provinsi; • Penumpang berangkat; • Penumpang tiba; • Frekuensi barang bongkar; • Frekuensi barang muat.
<ul style="list-style-type: none"> • Keterjangkauan 		<ul style="list-style-type: none"> • Presentase anggaran belanja infrastruktur terhadap dana APBD kabupaten/kota.
<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas 		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota.

Hasil Analisis Tematik Infrastruktur Provinsi Maluku



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Infrastruktur
01.	Maluku Tenggara Barat	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">INFRASTRUKTUR</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI</p> <p style="text-align: center;">KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 6 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA</p>
02.	Seram Bagian Barat	Rendah	Prioritas 1	
03.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
04.	Buru Selatan	Sedang		
05.	Kepulauan Aru	Sedang		
06.	Maluku Barat Daya	Sedang		
07.	Maluku Tenggara	Sedang		
08.	Seram Bagian Timur	Sedang		
09.	Kota Tual	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tengah			
11.	Kota Ambon			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur Provinsi Maluku

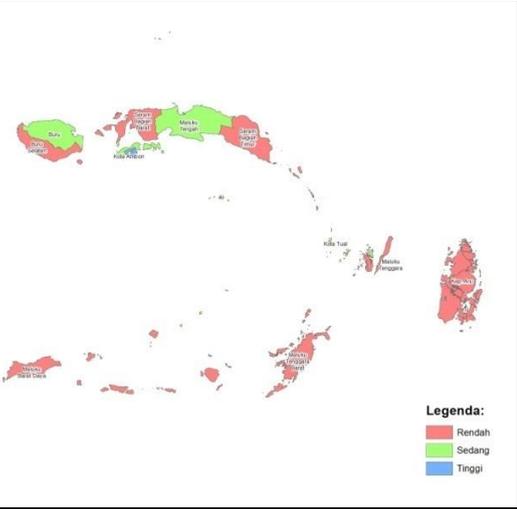
No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur
01.	Maluku Tenggara Barat	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kerusakan alat transportasi darat; • Tingginya persentase jalan dengan permukaan tanah, kerikil dan batuan yang diperkeras; • Terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk akses informasi, khususnya di perdesaan dan daerah terpencil, antapulau dan kepulauan; • Terbatasnya sarana pendukung dermaga; • Belum terintegrasinya pelabuhan-pelabuhan strategis yang ada; • Terbatasnya sarana pendukung di sebagian besar dermaga. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas jalan; - Peningkatan akses telekomunikasi; - Pengembangan transportasi darat/laut. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas jalan beraspal; - Pengembangan sistem telekomunikasi; - Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan dan dermaga. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Komunikasi dan Informatika; - Pemerintah Daerah.
02.	Buru Selatan			
03.	Kepulauan Aru			
04.	Maluku Barat Daya			
05.	Maluku Tenggara			
06.	Seram Bagian Timur			
07.	Kota Tual			
08.	Seram Bagian Barat	Sedang	Prioritas 2	
09.	Buru			
10.	Kota Ambon			
11.	Maluku Tengah	Tinggi	Prioritas 3	

Legenda:
■ Rendah
■ Sedang
■ Tinggi

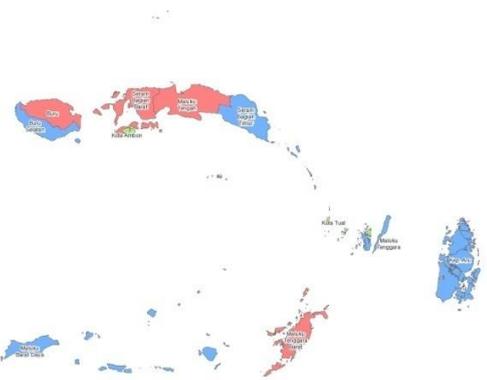
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

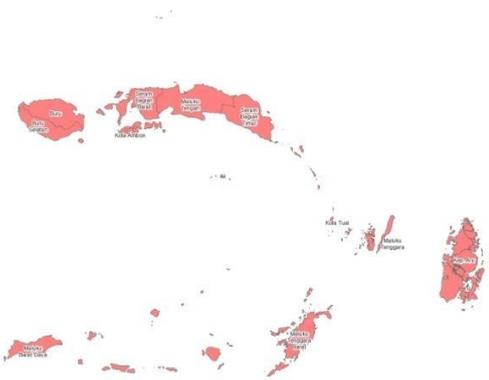
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur
01.	Maluku Tenggara Barat	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> Waktu tempuh cukup lama karena tekendala beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan; Rendahnya kondisi jalan mantab. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> Program: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas jalan dan perluasan kemantapan jalan beraspal. Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah.
02.	Seram Bagian Barat			
03.	Buru			
04.	Buru Selatan			
05.	Kepulauan Aru			
06.	Maluku Barat Daya			
07.	MalukuTenggara			
08.	Seram Bagian Timur			
09.	Kota Tual	Sedang	Prioritas 2	
10.	MalukuTengah			
11.	Kota Ambon	Tinggi	Prioritas 3	
 <p>Legenda: ■ Rendah ■ Sedang ■ Tinggi</p>				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur
01.	Maluku Tenggara Barat	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disparitas harga bahan bakar yang cukup tinggi antarpulau; • Biaya transportasi yang cukup mahal. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan sosial bagi masyarakat miskin. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Subsidi energi bagi masyarakat miskin; - Penyediaan transportasi publik bagi masyarakat miskin. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; - Kementerian Sosial; - Kementerian Perhubungan; - Pemerintah Daerah.
02.	Seram Bagian Barat			
03.	Buru			
04.	MalukuTengah			
05.	Kota Ambon	Sedang	Prioritas 2	
06.	Kepulauan Aru	Tinggi	Prioritas 3	
07.	Buru Selatan			
08.	Maluku Barat Daya			
09.	MalukuTenggara			
10.	Seram Bagian Timur			
11.	Kota Tual			
 <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendah Sedang Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur
01.	Maluku Tenggara Barat	Rendah	Prioritas 1	<p>1 Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi; • Minimnya sistem peringatan dini bencana alam. <p>2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program: <ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi bencana. • Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; - Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; - Pemasangan sistem peringatan dini; - Pembentukan desa tangguh bencana; - Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); - Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. • Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); - Pemerintah Daerah.
02.	Seram Bagian Barat			
03.	Buru			
04.	Buru Selatan			
05.	Kepulauan Aru			
06.	Maluku Barat Daya			
07.	MalukuTenggara			
08.	Seram Bagian Timur			
09.	Kota Tual			
10.	MalukuTengah			
11.	Kota Ambon			
 <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendah Sedang Tinggi 				
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

4.8

Tematik:

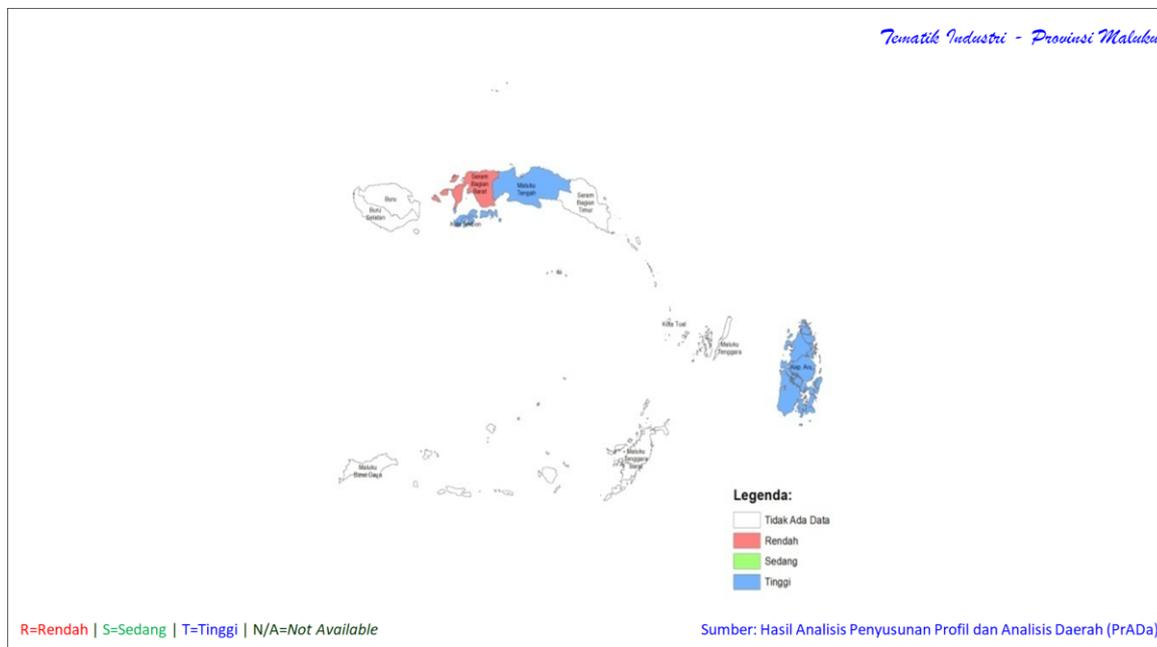
Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan

Provinsi Maluku



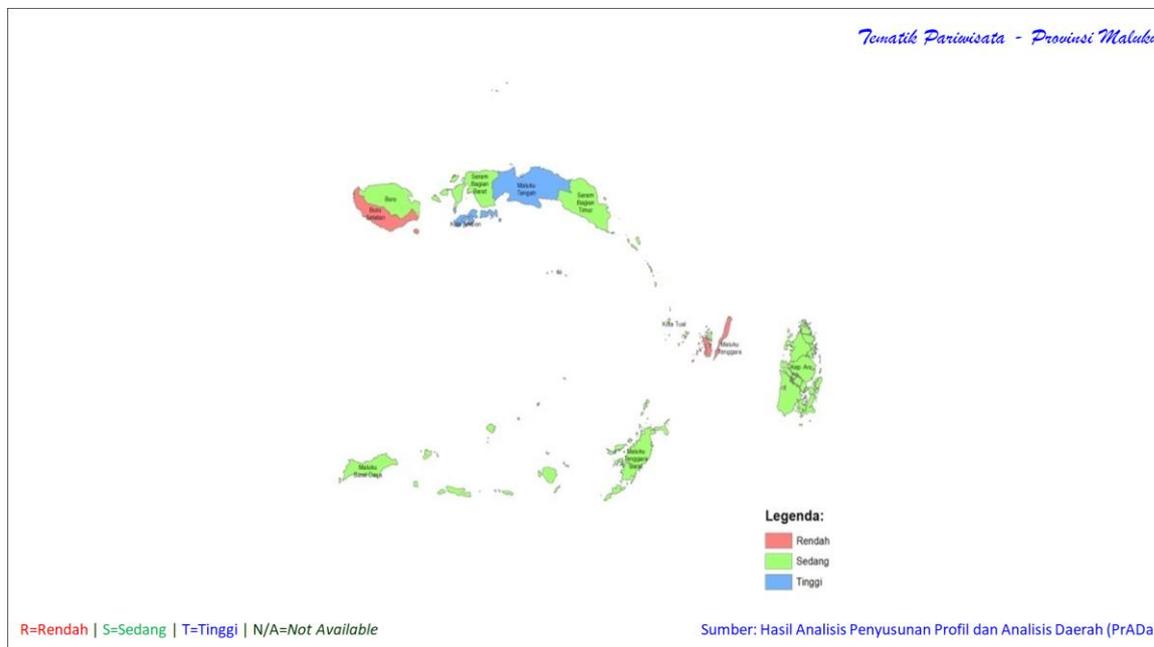
Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Industri dan Pariwisata Provinsi Maluku		
Kategori	Komponen	Indikator
● Industri		<ul style="list-style-type: none">● Jumlah tenaga kerja;● Nilai investasi;● Nilai produksi.
● Pariwisata		<ul style="list-style-type: none">● Akomodasi;● Jumlah kamar;● Jumlah tempat tidur;● Jumlah restoran;● Jumlah objek wisata.

Hasil Analisis Tematik Industri Provinsi Maluku



No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Industri
01.	Buru	N/A	-	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">INDUSTRI</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">RENDAH di Seram Bagian Barat</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 1 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : - KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya investasi di sektor industri di beberapa kabupaten/kota. • Rendahnya produksi di sektor industri di beberapa kabupaten/kota. • Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri.
02.	Buru Selatan	N/A	-	
03.	Maluku Barat Daya	N/A	-	
04.	Maluku Tenggara	N/A	-	
05.	Maluku Tenggara Barat	N/A	-	
06.	Seram Bagian Timur	N/A	-	
07.	Kota Tual	N/A	-	
08.	Seram Bagian Barat	Rendah	Prioritas 1	
09.	Kepulauan Aru	Tinggi	Prioritas 3	
10.	Maluku Tengah			
11.	Kota Ambon			
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.				Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Hasil Analisis Tematik Pariwisata Provinsi Maluku

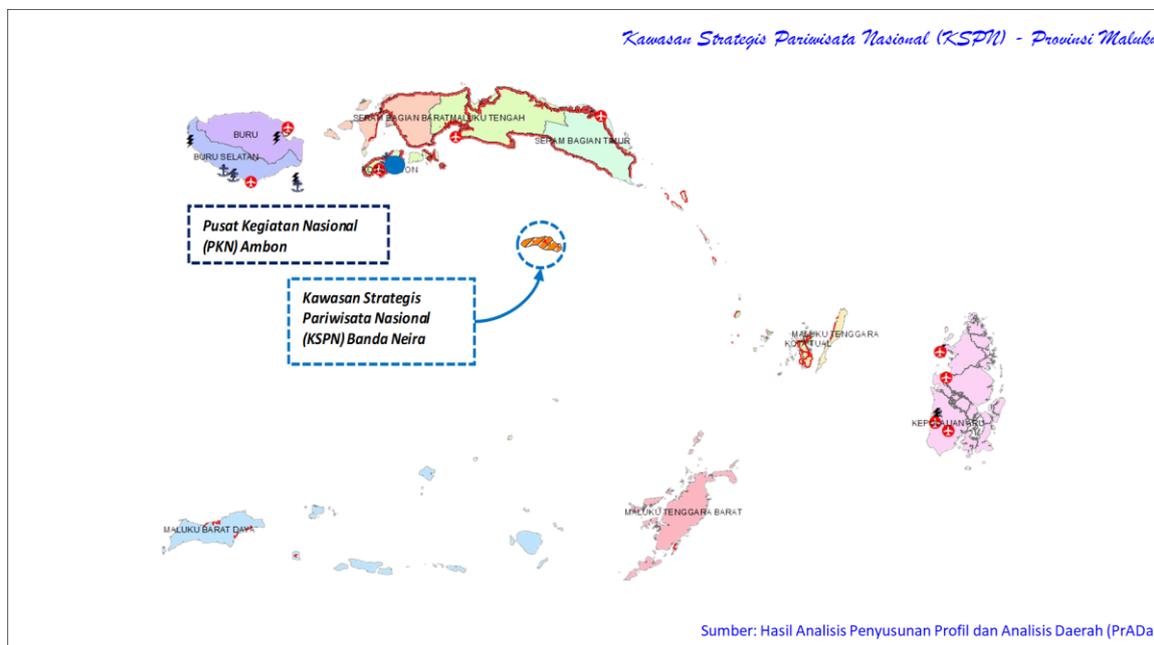


No.	Kabupaten/Kota	Status	Lokasi	Tematik Pariwisata
01.	Buru Selatan	Rendah	Prioritas 1	<p style="text-align: center;">RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK</p> <p style="text-align: center;">PARIWISATA</p> <p style="text-align: center;">KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI</p> <p style="text-align: center;">MALUKU</p> <p style="text-align: center;">DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF</p> <p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p style="text-align: center;">RENDAH : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">SEDANG : 7 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA</p> <p style="text-align: center;">Permasalahan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya penunjang sektor pariwisata, seperti ketersediaan akomodasi, restoran dan infrastruktur pendukung lainnya, di beberapa kabupaten/kota.
02.	Maluku Tenggara	Rendah	Prioritas 1	
03.	Buru	Sedang	Prioritas 2	
04.	Kepulauan Aru			
05.	Maluku Barat Daya			
06.	Maluku Tenggara Barat			
07.	Seram Bagian Barat			
08.	Seram Bagian Timur	Tinggi	Prioritas 3	
09.	Kota Tual			
10.	Maluku Tengah	Tinggi	Prioritas 3	
11.	Kota Ambon			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa)

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Provinsi Maluku



Permasalahan Utama KSPN Bandaneira:

- ① Minimnya kegiatan promosi KSPN Bandaneira;
- ② Kualitas hotel belum memenuhi standar;
- ③ Terbatasnya jadwal operasi kapal penyeberangan, sebagai sarana transportasi menuju KSPN Bandaneira;
- ④ Waktu tempuh dari Ambon menuju KSPN Bandaneira cukup lama, membutuhkan waktu \pm 6 jam, selain itu rata-rata kapal yang digunakan untuk transportasi kondisinya kurang layak;
- ⑤ Pengembangan transportasi darat masih terhambat permasalahan administrasi dan belum ada upaya untuk mengintegrasikannya didukung dengan pelayaran rakyat;
- ⑥ Belum optimalnya transportasi udara, dikarenakan terbatasnya panjang landasan yang hanya bisa digunakan oleh pesawat kecil dengan jumlah penumpang \pm 15 orang.

Sektor Unggulan³ Provinsi Maluku

Salah satu fokus kebijakan pemerintah saat ini adalah pada pengembangan sektor kemaritiman dan kelautan. Hal ini tentu dapat memberikan angin segar bagi sektor perikanan. Pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perikanan menjadi paradigma baru pembangunan di era global yang dapat dilaksanakan secara rasional dan berkelanjutan. Menurut beberapa pakar kebijakan ini dinilai cukup baik karena didukung oleh adanya potensi sumber daya perikanan, khususnya perikanan laut yang cukup besar dan masih memiliki peluang yang cukup luas untuk digali lebih lanjut. Pemerintah Daerah berlomba-lomba untuk memacu pengembangan potensi dan keunggulannya secara optimal. Demikian halnya dengan Maluku, provinsi kepulauan di Indonesia yang memiliki potensi yang “menggairahkan” di sektor perikanan Indonesia.

Maluku memiliki sumber daya alam yang cukup besar, berupa kekayaan hutan dan kekayaan hasil laut. Maluku juga memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam. Namun demikian, pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dioptimalisasikan dengan lebih sistematis dan terencana secara komprehensif. Melihat hal ini, setiap daerah secara berdedikasi dapat menyusun strategi untuk mengembangkan dan menata dengan lebih baik dan mandiri pada sektor potensial dan unggul sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sektor potensial dan unggul pada hampir sebagian besar wilayah di Maluku terfokus pada sektor pertanian dan perikanan. Sampai saat ini, kebanyakan sektor perikanan yang cukup potensial masih selalu fokus pada “hasil mentah”, bukan pada hasil pengolahan. Meskipun ada industri perikanan, masih dalam skala yang kecil dan tidak sebanding dengan potensi sumber daya alam yang ada.

Produksi perikanan Maluku terus mengalami peningkatan, terutama untuk perikanan budidaya. Walaupun jumlah produksinya masih dibawah perikanan tangkap/laut, tren yang dimiliki menunjukkan arah yang positif dari tahun ke tahun, sehingga berpotensi untuk terus dikembangkan. Melihat hal tersebut, pengembangan sektor kelautan dan perikanan dapat diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan di Maluku jika permasalahan yang ada saat ini dapat diatasi. Sektor kelautan dan perikanan dalam jangka pendek diketahui sebagai sektor yang mampu memberikan dampak terhadap kegiatan produksi dari sektor lain (*Output Multiplier/OM*) dan peningkatan pendapatan masyarakat (*Income Multiplier/IM*). Hal ini menambah keyakinan bahwa sektor kelautan dan perikanan dapat menopang ekonomi provinsi Maluku.

3 Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.

No	Jenis Ikan	Nilai (Rp Juta)				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	Tambak	15.355	384.76	223295	516135	545989
	Bandeng	1	6.4	14.5	484.4	139300
	Mujair	0	0	33.6	54	0
	Lain-Lain	15.354	378.56	175195	515597	545849
II	Kolam	1.32	553.27	44967	3774	5865
	Mas	776	27.01	806.3	1286	1614
	Mujair	88	0	33.631	145	525
	Lain-Lain	456	51.26	10.53	2343	3727
III	Laut	1100.767	475	2926238	808139	1616234
Potensi Perikanan Budidaya		16.675	938.03	268262	519909	551854
Total		1117.44	1413.03	3194500.00	1328048.00	2168088.00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, provinsi Maluku.

Peningkatan hasil produksi perikanan juga mendorong peningkatan nilai produksi yang meningkat dari tahun ke tahun, terutama peningkatan nilai produksi perikanan budidaya yang cukup signifikan. Untuk mendukung pengembangan budidaya biota laut dan restocking, maka kegiatan pembenihan merupakan salah satu mata rantai dan faktor terpenting yang perlu diperluas. Pembenihan akan menjadi kegiatan ekonomi yang menguntungkan di masa depan sehingga sangat prospektif. Kegiatan pembenihan juga dapat dilakukan, baik oleh perorangan, khususnya nelayan dan petani ikan kecil dalam bentuk usaha skala rumah tangga maupun kelompok (asosiasi, koperasi, kelompok usaha dan lain-lain) untuk usaha skala besar.

5.1. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil analisis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian tematik RATA-RATA kabupaten/kota di wilayah provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- ① Pendidikan, tingkat capaian RENDAH hingga SEDANG;
- ② Kesehatan, tingkat capaian RENDAH;
- ③ Penanggulangan Kemiskinan, tingkat capaian RENDAH hingga SEDANG;
- ④ Perumahan dan Permukiman, tingkat capaian RENDAH;
- ⑤ Ketahanan Pangan, tingkat capaian SEDANG;
- ⑥ Ketahanan Energi, tingkat capaian RENDAH;
- ⑦ Infrastruktur, tingkat capaian SEDANG;
- ⑧ Industri, tingkat capaian RENDAH; dan Pariwisata, tingkat capaian SEDANG.

5.2. Rekomendasi

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) ini, oleh para pemangku kepentingan dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan, utamanya dalam rangka menyusun program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, sebagaimana yang telah diuraikan dan disajikan di dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) provinsi Maluku ini.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Metode analisis ini relatif baru dan belum memiliki banyak referensi yang dapat digunakan, utamanya dalam rangka merumuskan program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Oleh karenanya penerapan metode THIS dalam penyusunan PrADa ini, dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.